



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN JOMBANG

2025  
2029





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Dwi. Dr. Soekarno No. 141, M. Tugu, (322), 60132 Pab.  
JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN JOMBANG**

Nomor: 180/47/415.3A/2020

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2025-2029**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi (TPF) serta untuk memberikan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan bantuan dari a. yang dapat diperkuat dengan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dan penugasan/pejabat dalam Keputusan Dinas Lingkungan Hidup.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Lemausan Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 19, Tattabahan Lemausan Negara Republik Indonesia Nomor 2733;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lemausan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tattabahan Lemausan Negara Republik Indonesia Nomor 4293;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara Lemausan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tattabahan Lemausan Negara Republik Indonesia Nomor 4253;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas) Nomor 20/2004, Undang-Undang Nomor 19, Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Nomor 44/2011.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (UU-ETD) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pengamanan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Indonasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rencana Indonasi Wilayah Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18).
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Wilayah Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21, Undang-Undang Lemaeran Negara Republik Indonesia Nomor 48/7).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Anggaran Kecamatan, Daerah (KEMENDagri, 2017), serta Tata Cara Pelaksanaan RANPD, RANM dan RANPD Serta Tata Cara Pelaksanaan RANPD, RANM dan RANPD Serta (KEMENDagri, 2017 Nomor 1112).
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 393/2009 Tahun 2009 tentang Hasil Penelitian, Validasi dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Kabupaten dan Kota serta rekomendasi pemerintah kabupaten/kota.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 901/1.02.5/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66/2009 Tahun 2009 tentang Hasil Penelitian, Validasi, dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Kabupaten dan Kota serta rekomendasi pemerintah kabupaten/kota.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 26 Tahun 2022 tentang Hasil-Hasil Penelitian Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Alokasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2018 tentang Berlakukanya dan Fasilitas Anggaran Daerah Kabupaten Jember Anggaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 11/DA.
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kebijakan, Mekanisme Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

#### MERTUWILAY :

- Menyampaikan :**
- KESATU :** Menyetujui Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2030 dengan anggaran sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, menyampaikan :
1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana Program Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2030.
  2. Menetapkan komisi dan pejabat yang bertanggung jawab dan lebih pada koordinasi, arahan, laporan pertanggung jawaban pelaksanaan.
  3. Mendukung berbagai prosedur untuk lebih meningkatkan pekerjaan perencanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2030.
  4. Menetapkan komisi dan lebih pejabat bertanggung jawab untuk lebih penyusunan anggaran.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim diinstruksikan Diktum PERTAMA menyampaikan pada pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Menetapkan angka pembayaran pelaksanaan Laporan Cetak KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025.

Disusun di : Bandung  
 Pada tanggal : 15 Desember 2020



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
 SURABAYA

WISUDA ALUM, D.Y. 2021  
 Gedung F, lantai 1  
 MP. 201041172001211011

LAMPIRAN : KEMENTERIAN KEPALADKAB  
LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR : 188/15/415.14/2025  
TANGGAL : 11 Februari 2025

**TIM PENYIHIR BENCANA STRATISDI (REKSTRA)  
DASAR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2026**

NO	JABATAN	REKOMENDASI
1	Wakil	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2	Sekretaris	Seorang Kepala Lingkungan Hidup
3	Anggota	1. Kepala Bidang Konservasi Lingkungan; 2. Kepala Bidang Tata Lingkungan; 3. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pencegahan Bahaya Lingkungan; 4. Kepala Bidang Persebaran Sampah dan RTI; 5. Ka UPT Lahan/Cairan Lingkungan Hidup; 6. Ka UPT Persebaran Sampah; 7. Kasubag Urusan pada Dinas Lingkungan Hidup; 8. Kasubag Urusan dan Amd pada Dinas Lingkungan Hidup; 9. Sekretaris Lapangan di Dinas Lingkungan Hidup; 10. Pengawasan Program dan Rumpu.

Ditandatangani di : Jombang

Pada tanggal : 11 Februari 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN JOMBANG**



**MIFTAHUL ULUM, S.T., M.Si**

Head of Agency

NP-097120172001121000



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. P.O. Ds. MochalidWid'yan, No. 30 Telp. (0321) 84123 Fax. -  
JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 388/PH /413.04/2020

TERTANGGUNG

PERSTAPAS KENCANA STRATEGIS (KEMSTRA)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025-2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban yang terdapat dan tertera, pada dokumen Rencana Strategis (Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025-2026), diperlukan pemenuhan kerja sebagai salah satu indikator kinerja NKPD untuk tugas dan fungsi dalam jangka waktu tahun 2025-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Negara (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4291);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang

Strategi Keuangan Negara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Negeri Kepulauan Indonesia Tahun 2001 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Negeri Kepulauan Indonesia Tahun 2014 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8917);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Negeri Kepulauan Indonesia Tahun 2010 Nomor 111;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Keuangan Daerah Kabupaten Negeri Kepulauan Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategi Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 334/2000 Tahun 2001 Tentang Hasil Wilkaid, Wilkaid dan Lembaran peraturan-peraturan Wilkaid, Wilkaid dan Lembaran peraturan-peraturan pembangunan keuangan daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/12.5-1/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/2009 Tahun 2009 tentang Soal Uji/Esai, Validasi, dan Penyelenggaraan Penastabilan (Kualifikasi, Kompetensi dan Wewenang) Petugas Pengawasan dan Pengawasan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Penastabilan, Disiplin, Penastabilan, dan Pengawasan Daerah yang Diarahkan dengan Misi Jabatan, Tugas, dan Fungsi Berbasis Faktualitas 2022 dan Daerah Otonomi Baru;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip-prinsip Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2017 Nomor 12/2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Manajemen Pengawasan Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember Nomor 7/2020;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Manajemen Pengawasan Daerah Kabupaten Jember;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019-2045;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kebijakan, Rencana Operasional, Tugas Misi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

## MEMUTUKAN

### Menetapkan :

- KESATU : Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah selama 5 (lima) tahun untuk tahun 2025-2029;
- KEDUA : Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- KITCA** : Tiga rekam jejak yang telah disusun oleh  
Komite Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Jember Tahun 2020-2024 dapat menjadi acuan  
pengembangan program.
- KEMWAT** : Rencana umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Jember Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam  
menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan  
Hidup Kabupaten Jember Tahun 2020-2024.
- KEJIB** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di Jember

Pada tanggal 09 September 2020

KEPRALAYAN MINGGALIHAN BUNP  
KEMPAKUN KOTANAG



**NIPTAHILU, S.P., M.S.**  
Ketua Kelas II/4  
NIP. 7470117-201112-1-002

## KATA PENGANTAR

Rencana ini adalah dokumen perencanaan strategis yang akan kita buat bersama dan kita semua bisa, dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 dapat diartikan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dalam rangka pelaksanaan anggaran pembangunan secara efektif, efisien, dan transparan, yang tepat, maka perlu dilakukan perencanaan yang dapat mengikat dan telah disetujui oleh berbagai stakeholder lokal dari perencanaan tersebut selanjutnya dimuatkan dalam dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen perencanaan untuk periode tahunan, yaitu Rencana Kerja (Rakya). Dengan demikian diharapkan pelaksanaan hasil perencanaan menjadi sistematis, terorganisir, dan terarah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Perencanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang ini dimulai dari identifikasi isu-isu strategis bidang lingkungan hidup baik yang terjadi di Kabupaten Jombang maupun di tingkat nasional. Dengan memperhatikan masukan dan saran dari berbagai stakeholder, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menjabarkan isu-isu strategis bidang lingkungan hidup yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan seperti yang teruang dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Tentunya seluruh proses penyusunan yang telah dilakukan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

Kepala Daerah yang telah ditunjukkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jombang

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala dinas/instansi yang terkait dalam penyusunan dokumen Rencana ini, khususnya stakeholder yang telah terlibat. Semoga Rencana DLM Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tentang lingkungan hidup di Kabupaten Jombang demi terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Jombang, 10 September 2025

Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Jombang



MIYANUS ULUM, S.T., M.Si  
NIP. 19710117 200112 1 000

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2028

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	4
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	12
1.4. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II GAMBARAN PELATANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP</b>	
2.1. Gambaran Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup .....	16
2.2. Partisipasi dan Isi Strategi Dasar Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang .....	74
<b>BAB III RENCANA STRATEGIS KENDARAAN TUJAS DAN VISI</b>	
3.1. Tujuan Rencana PD Tahun 2023-2028 .....	107
3.2. Tujuan Rencana PD Tahun 2023-2028 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang .....	109
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana tahun 2023-2028 ...	126
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana PD Tahun 2023-2028 .....	128
<b>BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN MINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b> ...	133
<b>BAB V PENUTUP</b>	
Penutup .....	142

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2028

### DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pagowri Jalanan Berdasarkan Ekoran I dan II .....	29
Tabel 2.2 Pagowri Jalanan Berdasarkan Ekoran III .....	29
Tabel 2.3 Pagowri Pangkalan .....	29
Tabel 2.4 Pagowri Pelabuhan .....	30
Tabel 2.5 Daftar Jumlah Pagowri Menurut Kelengkapan .....	31
Tabel 2.6 Daftar Jumlah Pagowri Menurut Ekoran .....	31
Tabel 2.7 Daftar Jumlah Pagowri Menurut Pendidikan .....	31
Tabel 2.8 Daftar Jenis/Merkal .....	32
Tabel 2.9 Persepsi Kinerja Pelayanan EIM Kota Jambi .....	41
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan EIM .....	67
Tabel 2.11 Realisasi Peningkatan Akut Daerah (PAD) atau Pelayanan Daerah Lingkungan Hidup Kabupaten Jambi .....	73
Tabel 2.12 Pemetaan Pemukiman untuk Pemetaan Prioritas dan Sorotan Pembangunan Daerah .....	83
Tabel 2.13 Model layanan dan insentif pemaksimalan pelayanan EIM Kabupaten Jambi berdasarkan RTRM dan NIMB Kabupaten Jambi .....	90
Tabel 2.14 Perumusan dan Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jambi Tahun 2025-2029 dari Pemaksimalan Internal maupun Itu Eksternal Pembangunan Daerah .....	97
Tabel 2.15 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jambi Tahun 2025-2029 .....	103
Tabel 2.16 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Jambi .....	106
Tabel 2.17 Pemaksimalan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jambi tahun 2025-2029 .....	107
Tabel 2.18 Arah Kebijakan RPJMD dan Rencana PD .....	109
Tabel 2.19 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jambi .....	110
Tabel 2.20 Rumusan Program, Kegiatan, Dan D&S Kegiatan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jambi .....	116

## HENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2028

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember	131
Tabel 4.3 Program Prinsipis Export	147
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup	148
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup	168

## HENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

### DAFTAR SAHIBAN

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan ..	17
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup .....	18
Gambar 2.1 Perencanaan yang diadopsi pada masing-masing bidang sesuai Tugas Pokok dan Fungsi .....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Strategis Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib, dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang diadukan berdasarkan laporan Perubahan RPJPD dan berakibat signifikan.

Peraturan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2022-2026 merupakan hasil pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai instrumen untuk menyusun perencanaan jangka dan menengah terpadu yang tujuan Dinas Lingkungan Hidup sesuai tugas dan fungsinya. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember merupakan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup yang terpadu dengan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan

Final penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan standar Perundang-undangan Nomor 66 Tahun 2017 serta sesuai dengan tugas dan fungsi.

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

### ➤ Penyusunan peraturan

Pada tahapan ini dibentuk Tim Penyusun Rencana Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 105/00/415.04/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Setelah itu terbentuk, dilakukan observasi serta penyusunan agenda kerja dan penyempurnaan data informasi perencanaan pembangunan daerah.

### ➤ Penyusunan rancangan awal

Tahap penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang mencakup beberapa kegiatan yaitu:

- Analisis gambaran pekerjaan
- Analisis permasalahan
- Peninjauan dokumen perencanaan lainnya
- Analisis isu strategis
- Perumusan tujuan dan sasaran yang berpedoman pada rancangan RPJMD
- Perumusan strategi dan arah kebijakan
- Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikator, hasil kegiatan, dan kelompok sasaran yang berpedoman pada rancangan awal RPJMD

Berikut rangkuman kegiatan penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tersebut berkaitan dengan dalam dokumen Rancangan Awal Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang memuat:

- Pendahuluan
- Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

- Partisipasi dan isu strategis bidang lingkungan
  - Tujuan dan sasaran
  - Strategi dan area pencapaian
  - Rencana program dan kegiatan serta pencairan
  - Biaya penyelenggaraan bidang urusan
  - Penutup
- **Penyusunan rancangan**  
Rancangan Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember disusun untuk menyempurnakan rancangan awal Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan dibahas pada Forum Parangki Daerah.
- **Forum Parangki Daerah/Keter: Parangki Daerah**  
dibentukannya dengan mengundang para stakeholder Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, diantaranya adalah Kepala Kabupaten Jember, Dinas terkait, Camat dan Kepala Desa yang menjadi sasaran program/kegiatan Stakeholder, Sekolah Adhyaita, Kader lingkungan, LHM pemertua lingkungan, perusahan dan akademisi. Tujuan pembentukan Forum Parangki Daerah adalah untuk mendapatkan masukan dalam rangka pencapaian target kinerja urusan, program/kegiatan, hasil dan cakupan urusan sebagai acuan serta bentuk upaya pengkajian perkembangan dan isu strategis bidang lingkungan hidup tahun 5 (lima) tahun ke depan. Misi pelaksanaan forum parangki daerah dilaksanakan untuk bentuk kerja yang dilaksanakan oleh unsur yang memiliki stakeholder yang menghadiri Forum Parangki Daerah.
- **Penyusunan rancangan akhir**  
Rancangan akhir Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember disusun dalam rangka memperjelas strategi, area pencapaian, program dan kegiatan yang telah tertuang dalam

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

rancangan awal Rastera Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, berdasarkan bentuk acara Forum Perancangan Daerah.

### > Penetapan

Rancangan akhir Rastera Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang disetujui dan disahkan oleh Kepala Bappeda untuk divalidasi agar selaras dengan RPJMD. Setelah divalidasi kesesuaiannya, maka Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan akhir Rastera Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang kepada Bupati Jombang melalui Sekretaris Daerah untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Rastera Strategi Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan Eksternal yaitu kondisi objek urusan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian kondisi lingkungan regional yang merupakan perumusan Rastera Dinas Lingkungan Hidup dengan Rastera Provinsi Jawa Timur, dan lingkungan nasional yang terdapat perumusan dengan Rastera Kementerian Lingkungan Hidup serta menyelaraskan dengan perumusan Rencana Strategis Pemerintah RI Tahun 2019 tentang Efisiensi, Efektivitas, dan Efektivitas Penyelenggaraan dan Keuangan Daerah, sebagai keagungan internal yaitu kondisi internal dari Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana dan juga kebijakan Dinas Lingkungan Hidup. Program yang disusun dalam Rastera Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 berorde prioritas, dengan tetap mengacu pada dokumen yang telah ditetapkan periode sebelumnya. Program Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai dengan perkembangan Dinas Lingkungan Hidup, program lintas OPD dan program kerjasama utrajal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

Rencana Dasar Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam perwujudannya berlandaskan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain. Rencana dan dokumen perencanaan yang lain tersebut akan berinteraksi dalam pelaksanaan/realisasinya dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  
Perencanaan Pembangunan skala nasional terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Dasar Lingkungan Hidup yang berlandaskan dengan kebijakan-kebijakan lingkungan hidup.
2. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KPLH)  
Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KPLH) adalah kebijakan teknis dari RPJMN sebagai landasan. Rencana Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KPLH) ini dilaksanakan mengacu rencana program kerja dan akan selanjutnya sesuai dengan tugas yang terdapat dalam RPJMN. Dokumen ini menjadi pertimbangan dalam merencanakan hasil kebijakan yang sesuai dengan arahan yang terdapat dari rencana strategis nasional.
3. Rencana Strategis Daerah Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur  
Rencana Dasar Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah kebijakan teknis rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Rencana ini menjadi pemetaan penyusunan Rencana Dasar Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang agar

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

selaras dengan arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di provinsi Jawa Timur.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023-2029. Pedoman perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD diturunkan dalam RPJMD. RPJMD ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan selama lima tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang, serta menunjukkan visi serta misi kearah daerah terpilih dan wakil terpilih daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Rencana agr. dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tepat sesuai dengan tujuan rencana pembangunan yang terdapat dalam RPJMD.
5. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Derivat dari Rencana Dinas Lingkungan Hidup berupa rencana kerja yang memberi detail gambaran kerja tahunan termasuk cakupan program dan kegiatan serta cakupan anggaran. Ketersediaan anggaran dapat dijabarkan menjadi diagram berikut:

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

Gambar 3.1  
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan



Rencana strategi merupakan proses sistematis yang menyelaraskan dengan rumusan/realisasi program/kegiatan antiparti/pengorganisasian secara sistematis terhadap upaya untuk melaksanakan kebijakan dan mengupayakan hasil/mahab/ dampak/ upaya baik yang terorganisasi dan nyata. Rencana Strategi ini menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam menyusun rencana kerja periode Tahun 2022-2026. Dengan terwujudnya Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan mampu menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Dokumen ini menerjemahkan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun yang diwujudkan dalam program dan kegiatan setiap tahun yang terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Jombang di bidang lingkungan hidup.

### 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategi Desa Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keutamaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4035);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (yang diubah dengan beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan dan Pergeseran Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4396);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

- 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4708);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4317);
  9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang 10 Peraturan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5402);
  10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2018-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan urusan yang diserahkan sebagian dengan aduana urusan antara kementerian, lembaga, atau instansi lainnya yang tidak tetap;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang meliputi Penyelenggaraan pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian dampak lingkungan dan pengelolaan limbah lingkungan, peran serta masyarakat

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

dalam pemerintahan dan pengelolaan lingkungan relevan untuk Rencana Induk pengurusan dan perizinan lingkungan hidup;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2009 tentang Standar, Kode Etik, dan Sistematur Pelaksanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/KEMENLH tentang Pedoman Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Mekanis dan Kontrol Lingkungan Hidup Serta Kebijakan Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.L-2860 Tahun 2006 tentang Perubahan Kerja dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 040-6406 Tahun 2006 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Instrumentasi Pelaksanaan Standar, Kode Etik dan Sistematur Pelaksanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2027.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Limbah Baku Berbahaya dan Beracun.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sampah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Peraturan Kawal Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004-2008.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang.
26. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang.
27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kebijakan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang ini adalah untuk memberikan arah serta pedoman strategi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai target pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Rencana) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2022-2026 adalah:

1. Menyelatkan dokumen perencanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang terarah dan terukur selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Meningkatkan kesatuan dan koherensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada pilkades yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber dengan didukung sistem pengawalan dan pengendalian yang efektif.
3. Menyiapkan dokumen perencanaan yang relevan dengan perkembangan pada Peraturan Walikota Kabupaten Jombang, serta mempersiapkan program jaring dan perbaiki untuk kesejahteraan masyarakat pada rencana lima tahun dan rencana awal selama periode 2022-2026.
4. Meningkatkan lin-lin strategi visionary lingkungan hidup melalui perencanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan yang terarah dan dapat diwujudkan secara nyata.

### 1.4 Sistematisasi Penulisan

Sistematisasi penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2022-2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

Evaluasi Pembangunan Daerah, Telaah Diri Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Telaah Diri Perbaikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan payung sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Mengenalikan secara singkat latar belakang pembuatan, meliputi pengertian Rencana Perangkat Daerah, fungsi Rencana Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, proses penyusunan Rencana Perangkat Daerah, kelebihan Rencana Perangkat Daerah dengan RPJMD, Rencana K/L dan Rencana program/kegiatan/wilayah, dan konsep Rencana Perangkat Daerah. Selain itu juga terdapat uraian mengenai dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Rencana yang meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan kebijakan peraturan lainnya serta pokok-pokok yang dijabarkan dalam proses penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan perangkat daerah. Kemudian uraian mengenai tentang misionar dan tujuan dari penyusunan Rencana Perangkat Daerah dan ditutup dengan uraian mengenai keterkaitan penelitian yang mendasarkan rencana kerja dasar ini disusun.

### BAB II PEMBAHASAN PELAYATAN, PEMERALAMAN DAN ISU STRATEGIS

Membuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengatur secara singkat apa saja

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

salah satu yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, menggunakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengambatkan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang sudah dihadapi dan dicari pemecahannya melalui Rencana Perangkat Daerah ini. Serta mengartikan identifikasi permasalahan terintegrasi tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Kesehatan, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Daerah terpilih, dengan Rencana Kamaderim Lingkungan Hidup dan Kesehatan, Rencana Program Jene Tahan, Rencana Rencana Tesis Ruang Wilayah Kabupaten Jember dan Rajah Lingkungan Hidup Strategi serta pemertama ke-10 strategi yang akan ditargetkan melalui Rencana Dinas Lingkungan Hidup.

### **PADA TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH SEBUAH.**

Pada bagian ini ditunjukkan mengenai penyusunan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, penyusunan tujuan dan sasaran jangka menengah ini ditargetkan dengan indikator dan target tahunan agar dapat diukur capaian kinerja dan dapat diartikan ketercapaian pencapaian setiap tahun. Serta rumusan penyusunan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2022-2026 untuk mendukung. Untuk pada era ini harus dapat diartikan visi-misi dan kondisi status RPJMD berisikan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses peninjauan strategi dan arah kebijakan tersebut.

### REVISI PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Pada bagian ini diuraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendekatan indikator kinerja 3 (lima) tahun ke depan.

### REVISI PEGUJUK

Bagian ini berisi uraian tentang kompetensi dokumen Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2022-2026.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU**  
**STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

**2.1.1 Tujuan, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Tujuan pokok Dinas Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kadukolan, Sistem Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan berbagai urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di bidang Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
6. Penyelenggaraan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sesuai amanat Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretaris mendampingi;

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

1. Sub Bagian Urusan dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c) Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d) Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e) Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengabdian Masyarakat Lingkungan, membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional
- f) Bidang Konservasi Lingkungan, membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional
- g) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
- h) UPT Pengabdian Masyarakat

THEORY OF THE CURRICULUM



- 1. To understand the concept of curriculum
- 2. To understand the components of curriculum
- 3. To understand the role of curriculum in education

Walaupun memiliki berbagai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dapat dijabarkan sebagai berikut:

**a. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan kearsifan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga serta penatakelolaan keuangan;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi penganggaran tugas-tugas bidang;
4. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
5. Pengurusan Administrasi Kepegawaian, Keorganisasian, Pertanggungjawaban dan urusan rumah tangga;
6. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana dan Pelayanan Publik;
8. Pengurusan aset;
9. Pengurusan kebergunaan;
10. Pelaksanaan urusan pengumuman lain dan urusan informasi;
11. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategi dan pelaksanaan program, kegiatan dan rencana anggaran serta urusan dan pertanggungjawaban;

12. Penyelenggaraan pengajian bahan-bahan terkait dan koordinasi pemerintahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Rosttra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Hidop.
13. Penyelenggaraan Pengajian bahan-bahan kebijakan terkait pemerintahan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional dan prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP).
14. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akreditasi Kinerja Instansi Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan.
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

#### b. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tugas Dinas Lingkungan Hidup di tingkat inventarisasi, pemantauan dan informasi lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan hidup, kebijakan dan perencanaan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan konsep kebijakan penyelenggaraan Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPPLH), kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).
2. Koordinasi dan komunikasi penyelenggaraan Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPPLH) serta kajian lingkungan strategis (KLHS).

4. Fortifikasi makanan di bidang Pertahanan dan Pangan serta Lingkungan Hidup;
4. Penyusunan kajian dan analisis daya dukung, daya tampung, daya serap;
5. Penyusunan laporan analisis risiko lingkungan;
6. Koordinasi penyusunan instrumen pengendalian pencemaran dan, serta Peraturan Lingkungan Hidup (AMH/L, UML-UPL, dan Instrumen Analisis Risiko Lingkungan Hidup);
7. Fortifikasi terhadap dokumen lingkungan seperti Perencanaan Pengelolaan Lingkungan (RPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemertamaan Lingkungan (UPL/UPL);
8. Penyusunan dan Kajian Dokumen Lingkungan Hidup yang terintegrasi (kualitas jasa, tinjau pasar dan kesehatan);
9. Pelaksanaan proses rekomendasi persetujuan lingkungan;
10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
11. Penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan masyarakat dan komunitas dalam pengelolaan lingkungan hidup;
12. Pelaksanaan komunikasi dan edukasi di bidang lingkungan hidup;
13. Pelaksanaan inslitasi dan koordinasi upaya pengelolaan lingkungan hidup tingkat daerah;
14. Melaksanakan pelayanan pemerintahan data dan informasi lingkungan dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

**c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau**

Tugas pokok Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Puncoran (KTHSP) adalah menyelenggarakan

kegiatan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan meningkatkan kapasitas, penguatan kapasitas dan peningkatan kinerja petugas (Meningkatkan Kinerja Petugas) (MKNP). Untuk melaksanakan tugas pokok bidang pengendalian sampah dan Perencanaan, mempunyai fungsi:

1. Perencanaan kebijakan pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (L3B) domestik dan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTKHP);
2. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan pemantauan penanganan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (L3B) domestik dan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTKHP);
3. Pelaksanaan penataan, penyediaan serta pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (L3B) domestik dan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTKHP);
4. Perencanaan kebijakan pengangkutan retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan sampah;
5. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, serta pendampingan dalam upaya peningkatan peran masyarakat teknik pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (L3B) domestik dan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTKHP) termasuk dalam usaha maupun daerah lain;
6. Pelaksanaan monitoring, pengawasan serta evaluasi pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (L3B) domestik dan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTKHP);
7. Pelaksanaan kebijakan dan target pengurangan sampah;
8. Menetapkan kebijakan dan rekomendasi peraturan perundangan dan pengangkutan sampah dan Limbah Bahan

bertindak dan Kurikulum LMB daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan

- 4. Instruksikan bagi lembaga yang memiliki modal sebagai Unit Lingkungan Hidup.

#### **d. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan**

Tugas pokok Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan adalah menyelenggarakan sebagai urusan Dinas Lingkungan Hidup dalam Bidang pengendalian dampak lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, serta standarisasi pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan;
2. Pelaksanaan kebijakan dan pemberian rekomendasi dan Pertimbangan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menjadi kewenangan Daerah;
3. Pelaksanaan urusan urusan persiapan pelaksanaan dan Pertimbangan dan Pengawasan lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Pelaksanaan pengawasan Baku mutu lingkungan dan sumber perairan;
5. Pelaksanaan pemantauan terhadap sumber pencemar (airtial dan non airtial);
6. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengendalian lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan pembinaan pengendalian hukum lingkungan;
8. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar airtial dan non airtial;

9. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pencemaran informasi, pengelolaan serta pengendalian sumber pencemar institusi dan non institusi);
10. Pelaksanaan pendekatan tidak wajib menggunakan hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
11. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
12. Fasilitas penanganan pengaduan atau usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Pertambangan dan Pengalihan Lingkungan Hidup;
13. Penyediaan tanggula lingkungan hasil di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
14. Pengembangan sistem informasi penanganan pengaduan masyarakat atau usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup;
15. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan izin lingkungan dan izin pertambangan dan pengalihan lingkungan;
16. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penanganan kasus lingkungan;
17. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup;
18. Pelaksanaan pembinaan penerapan sistem manajemen lingkungan;
19. Pelaksanaan evaluasi penerapan sistem manajemen lingkungan;
20. Pemantauan dan pengalihan kualitas lingkungan non kegiatan/ usaha;
21. Pelaksanaan pengalihan peran serta masyarakat dalam pengembangan perencanaan lingkungan;
22. Peningkatan keti ap pada sumber air.

22. Pelaksanaan strategi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

#### a. Bidang Konservasi Lingkungan

Tugas pokok Bidang Konservasi adalah menyelenggarakan sebagai urusan Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang konservasi dan pemulihan kerusakan lingkungan, perlindungan sumber dan keberagaman hayati, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Konservasi Lingkungan, mempunyai fungsi:

1. Penetapan kebijakan perlindungan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam;
2. Pelaksanaan pelestarian keberagaman hayati;
3. Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
4. Pelaksanaan penanggulangan sumber daya alam;
5. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
6. Pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
7. Pelaksanaan inventarisasi keberagaman hayati dan sumber daya alam;
8. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemeliharaan, keberagaman, dan pengendalian kerusakan keberagaman hayati;
9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inventarisasi keberagaman hayati;
10. Penyelidikan konflik dalam pemeliharaan keberagaman hayati;
11. Pengawasan sistem informasi dan pengumpulan database keberagaman hayati.

10. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
11. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pemukiman jawa lingkungan;
12. Pelaksanaan pendampingan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dalam perencanaan dan pengujian lingkungan hidup;
13. Pelaksanaan terintegrasi data dan informasi sumber daya alam;
14. Penetapan kebijakan penghematan dan pemanfaatan energi;
15. Pelaksanaan pendampingan dan pemantauan peningkatan kualitas lingkungan di desa berbasis partisipasi masyarakat;
16. Pelaksanaan pendampingan dan pemantauan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

#### E. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Lingkungan Hidup adalah unit pelaksana tugas teknis pada Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan kegiatan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis perancang tugas pokok UPT Laboratorium Lingkungan Hidup adalah melaksanakan kegiatan tugas teknis lingkungan hidup di tingkat laboratorium lingkungan hidup, dalam melaksanakan tugas pokok UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis di tingkat laboratorium lingkungan.

3. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dalam rangka mengembangkan dan menjaga kualitas pelayanan lingkungan hidup berupa pengendalian, penelitian lingkungan dan kegiatan teknis lainnya yang berorientasi pada pemenuhan fungsi habitat alam konservasi;
4. Mengembangkan tempat yang diberikan dari masyarakat/budaya untuk dipertahankan dan sebagai model Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung para industri serta pasar yang berkembang;
5. Memberikan tawar bakti kepada setiap tempat yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan;
6. Pelaksanaan pemantauan rutin/ada jasa pengujian sesuai ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaan inspeksi kepada Dinas Lingkungan Hidup;
7. Pengendalian dan pemertan kebijakan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan;
8. Melakukan pemertakan/pengujian kualitas air bersih dan air limbah dan kegiatan terkait; maupun konservasi;
9. Melakukan pengelolaan kualitas udara ruang ambient dan kualitas udara dalam ruangan bergerak dan tidak bergerak;
10. Melakukan pemertakan tingkat kebisingan lingkungan, beban lingkungan dan tingkat getaran;
11. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketertarikan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai tugas dan fungsinya.

**g. UPT Pengelolaan Sampah**

Untuk Pelaksanaan Teknik Pengolahan sampah yang selanjutnya sesuai UPT Pengelolaan sampah akan sesuai pelaksanaan tugas:

lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pendukung. Tujuan utama UPT Pengelolaan Sampah Adas melaksanakan strategi tugas teknis Lingkungan Hidup di bidang tempat pemrosesan akhir sampah. Dalam melaksanakan tugas pokok, UPT Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan pada UPT Pengelolaan Sampah;
2. Pelaksanaan tugas kerangka kerja UPT Pengelolaan Sampah;
3. Pelaksanaan pelayanan pemrosesan dan pengalihan sampah;
4. Pelaksanaan inventarisasi dan mengontrol pemilikan fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
5. Penyusunan laporan kegiatan UPT Pengelolaan Sampah;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengalihan sampah;
7. Penyusunan beleid, kajian terhadap permasalahan teknis operasional di bidang tempat pemrosesan akhir sampah;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidangnya.

### 2.1.2 Sumber Daya Penegak Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memiliki sumber daya sebagai berikut:

#### a. Sumber Daya Manusia

Secara periodik pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dibedakan menjadi beberapa kriteria. Sifatnya adalah pembagian pegawai menurut jabatan struktural dalam II dan III, pegawai jabatan Struktural dalam IV dan pegawai jabatan staf. Pembinaan mengenai pembagian

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

pegawai tersebut dapat dijelaskan melalui tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.1  
Pegawai Jabatan Struktural Eselon II dan III

No	Nama	Jabatan
1	MIFTAULLILAH, ST, M.Si	Kabala Dinas Lingkungan Hidup
2	MUHAMMAD AMR KURNIAWAN, ST, M.Eng	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3	KHOLILAH KHOLILAH, S.S M.M	Kabid Tata Lingkungan
4	LLIH PURNITA, ST, M.P	Kabid Kesehatan Lingkungan
5	-	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Kualitas Lingkungan
6	-	Kabid Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau

Tabel 2.2  
Pegawai Jabatan Struktural Eselon IV

No	Nama	Jabatan
1	-	Kesekretariatan dan Kepegawaian
2	Dia. YULIATI, TARI, M.Si	Kesekretariatan dan Ases
3	HEWANI HANINDAH, ST	Kesekretariatan LKSD Dinas Lingkungan Hidup
4	-	Kesekretariatan Sampah

Tabel 2.3  
Pegawai Fungsional

No	Nama	Jabatan
1	ACHILDA ANGGARANI, S. DR, M.C.	Fungsional Pengawas Ahli Muda
2	VICTORIANIDAMAWATI, SH	Fungsional Pengawal Sampah Lingkungan Ahli Muda
3	DEWI MARLIANINGSIH	Fungsional Pengawal Sampah Lingkungan Ahli Muda
4	DEWI RAHAYU, D.E, S.E.	Fungsional Pengawal Sampah Lingkungan Ahli Muda
5	ANAN KHUSNULHATUN, SH, M.H	Fungsional Pengawal Sampah Lingkungan Ahli Muda
6	NURDANA, SH, M.M	Fungsional Pengawal Sampah Lingkungan Ahli Muda
7	MAYUMAD KURNIA S.T	Fungsional Pengawal Sampah Lingkungan Ahli Muda
8	FRATRY, ST, M.P	Fungsional Pengawal Lingkungan Ahli Muda

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

No	Nama	Jabatan
8	HAFID HUSSEIN, SE	Fungsional Pengawat Lignungan Jati Mada
9	ULUK PITHAN, ST, ME	Fungsional Penyuluh Lignungan Jati Mada
11	AMBI KOTON, S.P	Fungsional Penyuluh Lignungan Jati Mada

**Tabel 2.4**  
**Pegawai Jabatan Pelaksana**

NO	NAMA PEKERJANYA	STATUS	JABATAN
1	WISAP VERBON, S.T., M	PIB	Pengarah Teknik Kibunan Lng.
2	GLOK NURMAWATI, SE	PIB	Pengarah Teknik Kibunan
3	DELTA BANGKAL WIKOSAPRANA, S.E	PIB	Pengarah Teknik Kibunan
4	RAMDILA DITA DAMEN, ST	PIB	Pengarah Teknik Kibunan
5	HADI NURAMTORO	PIB	Pengembangan Perawatan
6	SILAMU	PIB	Pengembangan Perawatan
7	JAHMO TALPO	PIB	Pengembangan Perawatan
8	KATEKA NICHOLINA A.Md.R.	PIB	Pengarah Data dan Informasi
9	ROCHIMD MPTN	PIB	Pengembangan Perawatan
10	JAGU DY ROMASTI	PIB	Pengembangan Perawatan
11	AMPT ANITA	PIB	Pengembangan Perawatan
12	ANUS ANCHA	PIB	Pengembangan Perawatan
13	SUDARTO	PIPH Pejabat Dinas	Deputi Layanan Dinas
14	SIPRITO	PIPH Pejabat	Pengarah UPM Dinas
15	KELI HERMANTOH	PIPH Pejabat Dinas	Deputi Layanan Dinas
16	KICI	PIPH Pejabat Dinas	Pengarah UPM Dinas
17	WIDI PRITNO	PIPH Pejabat Dinas	Pengarah UPM Dinas
18	SILAMU, S.H	PIPH Pejabat Dinas	Deputi Layanan Operasional
19	SIRIUS	PIPH Pejabat Dinas	Deputi Layanan Dinas
20	BIRCH ROSAD	PIPH Pejabat Dinas	Deputi Layanan Dinas
21	RAM WITEDI	PIPH Pejabat Dinas	Pengarah UPM Dinas

Berikut ini adalah pengelompokan mengenai data pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang dibedakan menurut golongan, status dan pendidikan. Pengelompokan disajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.3  
 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Golongan	Jumlah
TK/1	1
TK/2	-
TK/3	1
TK/4	10
TK/5	3
TK/6	4
TK/7	2
TK/8	3
TK/9	1
TK	2
P	4
-	4
Jumlah Total	40

Tabel 2.4  
 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah
IA	1
IIA	1
IIIB	2
IIIC	1
IIID	1
Fungsional	11
Man	13
Jumlah Total	40

Tabel 2.7  
 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
SI	13
S2	12

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

Kategori	Jumlah
SD	3
SMA	12
SMK	1
SD	4
<b>Jumlah Total</b>	<b>20</b>

### b. Aset/ Modal

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memiliki di Jalan Prof. Dr. Nurhadih Mojjo Nomor 80 Jombang. Dengan menggunakan light operation dan maintenance. Dinas Lingkungan Hidup didukung dengan sarana pendukung. Sarana tersebut diberikan sebagaimana tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.8  
Daftar Aset Tetap Perawatan dan Pemeliharaan (Per 31 Mei 2022)

No	NAMA BARANG	JMLAH	VALUASI
1	Generator + Attachment	1	0,00
2	Generator listrik (set)	1	0,00
3	Bump Truck	10	0,00
4	Wheal loader (set)	2	0,00
5	Wheal loader + attachment	1	0,00
6	Wheel loader + Attachment	1	0,00
7	Belt Conveyor (Pistol)	1	0,00
8	Excavator - Caterpillar 320	2	0,00
9	Peralatan Water Pump	6	0,00
10	Generator Pump	4	0,00
11	Pompa Air	10	0,00
12	Wheal loader (set)	1	0,00
13	Mesin Bor Tanah	1	0,00
14	Unit Pengolahan Air Kotor	1	0,00
15	Barrel Minyak	6	0,00
16	Truck + Attachment	10	0,00
17	Wheal loader	2	0,00
18	Generator Motor	24	0,00
19	Wheal loader + attachment + attachment (set)	12	0,00
20	Mesin Penebat	1	0,00
21	Mesin Tangki Air	1	0,00
22	Truck Sampah	4	0,00
23	Generator Listrik	3	0,00

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

No	NAMA BARANG	JENJANG	BIAYA
24	Makin Bor	1	000
25	Makin Kompresor	2	000
26	Makin Las Listrik	1	000
27	Makin Pemotong Pipa	1	000
28	Makin Cor Inta Tangan	1	000
29	Makin Bor Tangan	1	000
30	Makin Canggih	12	000
31	Gergaji Chain Saw	6	000
32	Peralatan Las Listrik	1	000
33	perbaikan bengkel servis lainnya (tdk)	12	000
34	Tapel Catokan Sat	1	000
35	Kunci Pas	2	000
36	Sumi Perek Wiper	3	000
37	Uji Calibration RK	20	000
38	Threading reamer (M16 1/2x 1/2x 1/2)	1	000
39	Tren Tuber Sengk (sambungan) 100x 100 mm 10 m	18	000
40	Labu Tekan (Tekanan 10) berbagai kapasitas	9	000
41	alat pengalihan tenaga dan pemutus lainnya (jkr)	2	000
42	Suku-suku Perengkapan	6	000
43	Alat Laboratorium lainnya	1	000
44	Alat Pressing lainnya	12	000
45	Alat Pemecah Batu	7	000
46	Cermin	120	000
47	Makin Bor & Layak Plastik (11-13 mm)	1	000
48	Lantai Bas/Wall	29	000
49	Lantai Parkir	9	000
50	Lah Besi	18	000
51	Rak Kayu	1	000
52	Tiling Catokan Besi	14	000
53	Tiling Catokan Kayu	2	000
54	Manula Tala	1	000
55	Lentera	1	000
56	Konvensional	28	000
57	Lantai Kaca	3	000
58	CCTV - Camera Control Television System	2	000
59	Papan Vinyl, Papan Fibre	18	000
60	White Board	1	000
61	Alat Pengalihan Tenaga	6	000
62	Makin Akumulasi	6	000
63	Overhead Projector	2	000
64	Pengapal Beton	2	000

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

No	NAMA BARANG	JMLAH	ESTIMASI
65	LCD Projector, Toshiba	1	Daftar
66	Pegangan Tunggal ukuran	20	Daftar
67	Kas Kanvas Lainnya	26	Daftar
68	Misa Krim Bayi	10	Daftar
69	Kursi Baji/Mandi	14	Daftar
70	Kursi Bayi	1	Daftar
71	Misa Bayi	3	Daftar
71	Misa Toilet	1	Daftar
73	Misa Kacamata	1	Daftar
74	Misa Tambahan	1	Daftar
75	Misa 1/2 Bina	20	Daftar
76	Kursi Bayi	108	Daftar
77	Kursi Tami	5	Daftar
78	Kursi Pukul	3	Daftar
79	Kursi Bina	16	Daftar
80	Kursi Lipat	18	Daftar
81	Mobil untuk lainnya	10	Daftar
81	Mobil Penghantar Buku/Tawaran Ekstensi	1	Daftar
82	Mobil Pemungut Sampah	40	Daftar
84	Kas Lembar/Lainnya	160	Daftar
85	Lemari Biji	1	Daftar
86	A/C Inverter	1	Daftar
87	A/C Window	10	Daftar
88	A/C Split	18	Daftar
89	Kompor Gas (Jala Dapur)	1	Daftar
90	Tabung Gas	1	Daftar
91	Trombol/Tambak Air	5	Daftar
91	Palang	4	Daftar
92	Sound System	5	Daftar
94	Wardah	1	Daftar
95	MegaPhone	1	Daftar
96	Handphone	2	Daftar
97	Unit Server (Gedung)	1	Daftar
98	Tasari	1	Daftar
99	Tiang Borden	1	Daftar
100	Tangga Aluminium	1	Daftar
101	Staples	6	Daftar
102	Stylin, Kray	1	Daftar
103	Tangga	1	Daftar
104	Kas Lembar Tangga Lainnya	21	Daftar
104	Kas Lembar/Lainnya	10	Daftar
106	Misa Krim Probiotik Bayi (B)	5	Daftar
107	Misa Krim Probiotik Bayi (B)	5	Daftar

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

No	NAMA BARANG	JUMLAH	UNIT/HR
108	Noda Kertas Pembersih lantai	11	Org
109	Noda Kertas Pembersih Lemari	1	Org
110	Kursi Keras Pembersih Lantai II	1	Org
111	Kursi Keras Pembersih Lantai III	4	Org
112	Kursi Keras Pembersih Lantai IV	15	Org
113	Kursi Keras Pajangan (Non Struktural)	3	Org
114	Kursi Keras Pembersih Lemari	7	Org
115	Kursi Keras Rempang Sederet Pajangan Lantai III	18	Org
116	Buku Pustaka	1	Org
117	Lemari Jang Pajangan Lemari	2	Org
118	Audioteknologi Jernih	1	Org
119	Disinfectant - Power Supply (DPS)	5	Org
120	Camera Diagnostic	2	Org
121	Sabun Pembersih	1	Org
122	Camera Film	1	Org
123	Layar Film/Processor	4	Org
124	Camera Compact	1	Org
125	Waski Tahan UV	4	Org
126	DPS (Kiri dan Kanan) Lemari	2	Org
127	Detektor Gas (Humidity Control)	1	Org
128	Cover	1	Org
129	Igniter Photo Meter	1	Org
130	Bahan Catemmer	1	Org
131	Acumedia Kertas	1	Org
132	Stroller Koper	12	Org
133	Cermin Dinding	1	Org
134	Perawatan Magnet Kiri	1	Org
135	Over (Akan Laksanakan Tahun)	1	Org
136	Buku	2	Org
137	Yasun Pung	2	Org
138	Alas Dudukan Air	1	Org
139	Cerang	2	Org
140	Lampiran Air Filter	1	Org
141	Subjangan	2	Org
142	Cover Casing Nelayan	2	Org
143	Wipemeter (Akan Laksanakan Tahun)	1	Org
144	Noda Pajangan	18	Org
145	Lampiran Tenda	2	Org
146	Sand, Dikawat, Tenda	1	Org
147	Baki, Dikawat, Tenda	1	Org
148	Stroller	1	Org
149	Power Supply (Akan Laksanakan Tahun)	1	Org

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

No	NAMA BARANG	JENJANG	BULNNE
120	Disposal Solid Waste For Civil Laboratory (Makassar)	1	Daerah
141	Igniter	1	Daerah
181	Exhaust Fan	1	Daerah
185	Vacuum Filtration Part	4	Daerah
184	Carbon Disulfide	2	Daerah
186	Kyocera	1	Daerah
188	PH Meter Portable	2	Daerah
187	Sound Level Meter (Makassar) (Makassar)	1	Daerah
192	Hot Plate - General	1	Daerah
189	Laboratory Emergency Shower, Eyewash	1	Daerah
190	Scale	1	Daerah
194	Hot Water	6	Daerah
192	Water Control Lamp	4	Daerah
195	Thermometer	1	Daerah
194	Acid to Alkalinity Test (Spectrophotometer)	12	Daerah
165	X-Ray Fluorescence (XRF)	1	Daerah
166	analytical instrument - mercury (Daerah)	4	Daerah
167	Document Analytical System (General Laboratory Test)	1	Daerah
168	Water Sampler (General Laboratory Test)	1	Daerah
169	Hot Plate (General Laboratory Test)	1	Daerah
170	Gold Chlor	6	Daerah
171	Carbon Aluminum	1	Daerah
172	Carbon Test	2	Daerah
173	Gold Plate	15	Daerah
174	DO Meter (Makassar) (Makassar) (Kualitas Air Dan Tanah)	2	Daerah
176	Conductivity Meter (Makassar) (Kualitas Air Dan Tanah)	1	Daerah
176	Water Quality Analysis System	1	Daerah
177	Water Sample	1	Daerah
178	Carbon Tester (Makassar) (Kualitas Air Dan Tanah)	2	Daerah
179	Calorimeter (Makassar) (Kualitas Air Dan Tanah)	1	Daerah
180	CO2 Analyzer	1	Daerah
181	air laboratory analysis instrument - mercury (Daerah)	26	Daerah
180	Hot Water Air Sampler	2	Daerah
180	Hot Sample	2	Daerah

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

No	NAMA BARANG	JUMLAH	UNITAS
124	alat laboratorium (material, data, lainnya) DTD	1	Unit
126	Buku (buku)	1	Unit
128	alat laboratorium (material, data, lainnya) DTD	1	Unit
127	alat laboratorium (supplies, alat, lainnya) lainnya DTD	10	Unit
130	Workshop Kedisiplinan (Pelayanan Masyarakat Workshop)	1	Unit
139	Kasir-Baki (alat laboratorium) Tabung Gas-Du-Gas)	1	Unit
139	Kit Kimia Kimia Lainnya	1	Unit
141	Kuliner	15	Unit
142	Buku Baki	1	Unit
145	Buku Bagan	6	Unit
144	Filter Pencil	1	Unit
146	Lampu Ruang Kerja	1	Unit
146	Pd Gas	10	Unit
147	Lat Top	14	Unit
148	Kopi Snek	11	Unit
149	Printer (Pelayanan Internal Komputer)	12	Unit
150	Scanner (Pelayanan Internal Komputer)	1	Unit
151	Korona	1	Unit
152	Emasak Plastik Plastik	1	Unit
153	Tanda	3	Unit
156	Bangka Coran	1	Unit
158	Demikian Demikian Lainnya	6	Unit
158	Peralatan Lainnya (lainnya) DTD	7	Unit

Sumber Data: RKEDU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel 2.5 tentang Pelaksanaan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2020-2026. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

sehati dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Urusan Lingkungan Hidup menjadi bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang tersebut bahwa Standar Pelayanan Minimal didefinisikan sebagai jabatan tanggung jawab dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang harus disediakan setiap warga negara secara minimal, sebagai pada Undang-Undang tersebut, semua yang termasuk kategori Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar ada 6 (enam) urusan yaitu:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pelayanan Umum dan Pemukiman Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Pemukiman
- e. Ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Dengan demikian, sejak tahun 2007-2018, evaluasi kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tidak lagi diukur menggunakan indikator SPB, namun menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan juga Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum dan Pemukiman Ruang khususnya pada sub urusan perumahan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

3. Indeks Kualitas Labor (IKL)
4. Peningkatan tempat tumbuh di fasilitas pengabdian masyarakat
5. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Pada tahun 2021 dilakukan pengujian terhadap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang diatur kemudian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Maksud, Tujuan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Implikasi dan keterkaitan peraturan perundang-undangan tersebut adalah adanya perubahan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi karena adanya pemindahan Jabatan Keistimewaan eselon 4 menjadi Fungsional. Gambaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang pada periode Renstra 2024-2026 dituliskan pada tabel di bawah ini:

Financial Statements Prepared Pursuant to the Financial Reporting Requirements of the Companies Act, 2013

Particulars	2018				2017				2016			
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Income from operations	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111
Other income	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111
Expenses	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)
Profit before tax	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111
Tax expense	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)
Profit after tax	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111
Dividend paid	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)	(1,11,11,111)
Profit available for members	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111
Members' share of profit	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111
Members' share of loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Members' share of profit/loss	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111	1,11,11,111

Problem	Equation	Graph	Intercept	Slope
1	$y = 2x + 3$		(0, 3)	2
2	$y = -x + 5$		(0, 5)	-1
3	$y = 4x - 2$		(0, -2)	4
4	$y = 0.5x + 1$		(0, 1)	0.5
5	$y = -3x + 7$		(0, 7)	-3
6	$y = 1.5x - 4$		(0, -4)	1.5
7	$y = 2x + 1$		(0, 1)	2
8	$y = -2x + 3$		(0, 3)	-2
9	$y = 3x - 1$		(0, -1)	3
10	$y = 0.7x + 2$		(0, 2)	0.7
11	$y = -1.5x + 6$		(0, 6)	-1.5
12	$y = 2.5x - 3$		(0, -3)	2.5
13	$y = -0.8x + 4$		(0, 4)	-0.8
14	$y = 1.2x - 5$		(0, -5)	1.2
15	$y = -4x + 1$		(0, 1)	-4
16	$y = 0.9x + 3$		(0, 3)	0.9
17	$y = -2.5x + 8$		(0, 8)	-2.5
18	$y = 3.5x - 2$		(0, -2)	3.5
19	$y = -1.1x + 5$		(0, 5)	-1.1
20	$y = 1.8x - 4$		(0, -4)	1.8

Problem	Slope-Intercept Form			Point-Slope Form			Standard Form		
	$y = mx + b$	$y - y_1 = m(x - x_1)$	$Ax + By = C$	$y - y_1 = m(x - x_1)$	$Ax + By = C$	$Ax + By = C$	$y - y_1 = m(x - x_1)$	$Ax + By = C$	$Ax + By = C$
1. Find the equation of the line passing through the points $(-2, 3)$ and $(1, 5)$ .									
2. Find the equation of the line passing through the points $(-1, 2)$ and $(3, 0)$ .									
3. Find the equation of the line passing through the points $(0, 4)$ and $(2, 0)$ .									
4. Find the equation of the line passing through the points $(-3, 1)$ and $(1, -1)$ .									
5. Find the equation of the line passing through the points $(-4, 2)$ and $(0, -2)$ .									
6. Find the equation of the line passing through the points $(-1, 3)$ and $(2, 1)$ .									
7. Find the equation of the line passing through the points $(-2, 4)$ and $(1, 2)$ .									
8. Find the equation of the line passing through the points $(-3, 2)$ and $(0, 0)$ .									
9. Find the equation of the line passing through the points $(-4, 1)$ and $(1, -3)$ .									
10. Find the equation of the line passing through the points $(-5, 3)$ and $(2, -1)$ .									

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	ACCOUNT	INITIALS
10/1/58	...	...	...	...	...
10/2/58	...	...	...	...	...
10/3/58	...	...	...	...	...
10/4/58	...	...	...	...	...
10/5/58	...	...	...	...	...
10/6/58	...	...	...	...	...
10/7/58	...	...	...	...	...
10/8/58	...	...	...	...	...
10/9/58	...	...	...	...	...
10/10/58	...	...	...	...	...
10/11/58	...	...	...	...	...
10/12/58	...	...	...	...	...
10/13/58	...	...	...	...	...
10/14/58	...	...	...	...	...
10/15/58	...	...	...	...	...
10/16/58	...	...	...	...	...
10/17/58	...	...	...	...	...
10/18/58	...	...	...	...	...
10/19/58	...	...	...	...	...
10/20/58	...	...	...	...	...
10/21/58	...	...	...	...	...
10/22/58	...	...	...	...	...
10/23/58	...	...	...	...	...
10/24/58	...	...	...	...	...
10/25/58	...	...	...	...	...
10/26/58	...	...	...	...	...
10/27/58	...	...	...	...	...
10/28/58	...	...	...	...	...
10/29/58	...	...	...	...	...
10/30/58	...	...	...	...	...
10/31/58	...	...	...	...	...
TOTAL		...			

RESEARCH DESIGN AND METHODS

No.	Description of the study	Study design			Study population			Data collection			Data analysis		
		Design	Setting	Duration	Sample size	Sampling method	Response rate	Instrument	Validity	Reliability	Statistical test	Significance level	
1	Study 1: A cross-sectional study of the prevalence of hypertension among adults aged 18 years and above in a rural area of South Africa.	Cross-sectional	Rural area	1 year	1000	Simple random sampling	95%	Structured questionnaire	Content validity	Cronbach's alpha	Chi-square	0.05	
2	Study 2: A longitudinal study of the effect of a health education intervention on the knowledge and attitude of pregnant women in a peri-urban area of South Africa.	Quasi-experimental	Peri-urban area	6 months	200	Convenience sampling	80%	Knowledge and attitude questionnaire	Content validity	Cronbach's alpha	T-test	0.05	
3	Study 3: A descriptive study of the prevalence of dental caries among school children aged 12 years in a town in South Africa.	Descriptive	Town	1 year	500	Systematic sampling	90%	DMFT index	Content validity	Cronbach's alpha	Chi-square	0.05	
4	Study 4: A case-control study of the risk factors for cervical cancer among women in a town in South Africa.	Case-control	Town	1 year	100	Purposive sampling	85%	Structured questionnaire	Content validity	Cronbach's alpha	Odds ratio	0.05	
5	Study 5: A descriptive study of the prevalence of mental health problems among students in a university in South Africa.	Descriptive	University	1 year	1000	Simple random sampling	90%	Structured questionnaire	Content validity	Cronbach's alpha	Chi-square	0.05	

**RESEARCH LOCAL BUSINESS FINANCIAL**

No	Description of Financial Statement	2023			2022			2021			2020		
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
1	Revenue												
2	Cost of Sales												
3	Gross Profit												
4	Operating Expenses												
5	Operating Income												
6	Interest Expense												
7	Income Before Tax												
8	Tax Expense												
9	Net Income												
10	Other Income												
11	Other Expenses												
12	Net Income Before Other												
13	Other Income												
14	Other Expenses												
15	Net Income												

Item	Quantity	Unit	Rate	Total
1. 1000	1000	kg	1.00	1000.00
2. 500	500	kg	1.00	500.00
3. 200	200	kg	1.00	200.00
4. 100	100	kg	1.00	100.00
5. 50	50	kg	1.00	50.00
6. 25	25	kg	1.00	25.00
7. 12	12	kg	1.00	12.00
8. 6	6	kg	1.00	6.00
9. 3	3	kg	1.00	3.00
10. 1	1	kg	1.00	1.00
11. 0.5	0.5	kg	1.00	0.50
12. 0.25	0.25	kg	1.00	0.25
13. 0.12	0.12	kg	1.00	0.12
14. 0.06	0.06	kg	1.00	0.06
15. 0.03	0.03	kg	1.00	0.03
16. 0.01	0.01	kg	1.00	0.01
17. 0.005	0.005	kg	1.00	0.005
18. 0.0025	0.0025	kg	1.00	0.0025
19. 0.0012	0.0012	kg	1.00	0.0012
20. 0.0006	0.0006	kg	1.00	0.0006
21. 0.0003	0.0003	kg	1.00	0.0003
22. 0.0001	0.0001	kg	1.00	0.0001
23. 0.00005	0.00005	kg	1.00	0.00005
24. 0.000025	0.000025	kg	1.00	0.000025
25. 0.000012	0.000012	kg	1.00	0.000012
26. 0.000006	0.000006	kg	1.00	0.000006
27. 0.000003	0.000003	kg	1.00	0.000003
28. 0.000001	0.000001	kg	1.00	0.000001
29. 0.0000005	0.0000005	kg	1.00	0.0000005
30. 0.00000025	0.00000025	kg	1.00	0.00000025
31. 0.00000012	0.00000012	kg	1.00	0.00000012
32. 0.00000006	0.00000006	kg	1.00	0.00000006
33. 0.00000003	0.00000003	kg	1.00	0.00000003
34. 0.00000001	0.00000001	kg	1.00	0.00000001
35. 0.000000005	0.000000005	kg	1.00	0.000000005
36. 0.0000000025	0.0000000025	kg	1.00	0.0000000025
37. 0.0000000012	0.0000000012	kg	1.00	0.0000000012
38. 0.0000000006	0.0000000006	kg	1.00	0.0000000006
39. 0.0000000003	0.0000000003	kg	1.00	0.0000000003
40. 0.0000000001	0.0000000001	kg	1.00	0.0000000001
41. 0.00000000005	0.00000000005	kg	1.00	0.00000000005
42. 0.000000000025	0.000000000025	kg	1.00	0.000000000025
43. 0.000000000012	0.000000000012	kg	1.00	0.000000000012
44. 0.000000000006	0.000000000006	kg	1.00	0.000000000006
45. 0.000000000003	0.000000000003	kg	1.00	0.000000000003
46. 0.000000000001	0.000000000001	kg	1.00	0.000000000001
47. 0.0000000000005	0.0000000000005	kg	1.00	0.0000000000005
48. 0.00000000000025	0.00000000000025	kg	1.00	0.00000000000025
49. 0.00000000000012	0.00000000000012	kg	1.00	0.00000000000012
50. 0.00000000000006	0.00000000000006	kg	1.00	0.00000000000006
51. 0.00000000000003	0.00000000000003	kg	1.00	0.00000000000003
52. 0.00000000000001	0.00000000000001	kg	1.00	0.00000000000001
53. 0.000000000000005	0.000000000000005	kg	1.00	0.000000000000005
54. 0.0000000000000025	0.0000000000000025	kg	1.00	0.0000000000000025
55. 0.0000000000000012	0.0000000000000012	kg	1.00	0.0000000000000012
56. 0.0000000000000006	0.0000000000000006	kg	1.00	0.0000000000000006
57. 0.0000000000000003	0.0000000000000003	kg	1.00	0.0000000000000003
58. 0.0000000000000001	0.0000000000000001	kg	1.00	0.0000000000000001
59. 0.00000000000000005	0.00000000000000005	kg	1.00	0.00000000000000005
60. 0.000000000000000025	0.000000000000000025	kg	1.00	0.000000000000000025
61. 0.000000000000000012	0.000000000000000012	kg	1.00	0.000000000000000012
62. 0.000000000000000006	0.000000000000000006	kg	1.00	0.000000000000000006
63. 0.000000000000000003	0.000000000000000003	kg	1.00	0.000000000000000003
64. 0.000000000000000001	0.000000000000000001	kg	1.00	0.000000000000000001
65. 0.0000000000000000005	0.0000000000000000005	kg	1.00	0.0000000000000000005
66. 0.00000000000000000025	0.00000000000000000025	kg	1.00	0.00000000000000000025
67. 0.00000000000000000012	0.00000000000000000012	kg	1.00	0.00000000000000000012
68. 0.00000000000000000006	0.00000000000000000006	kg	1.00	0.00000000000000000006
69. 0.00000000000000000003	0.00000000000000000003	kg	1.00	0.00000000000000000003
70. 0.00000000000000000001	0.00000000000000000001	kg	1.00	0.00000000000000000001
71. 0.000000000000000000005	0.000000000000000000005	kg	1.00	0.000000000000000000005
72. 0.0000000000000000000025	0.0000000000000000000025	kg	1.00	0.0000000000000000000025
73. 0.0000000000000000000012	0.0000000000000000000012	kg	1.00	0.0000000000000000000012
74. 0.0000000000000000000006	0.0000000000000000000006	kg	1.00	0.0000000000000000000006
75. 0.0000000000000000000003	0.0000000000000000000003	kg	1.00	0.0000000000000000000003
76. 0.0000000000000000000001	0.0000000000000000000001	kg	1.00	0.0000000000000000000001
77. 0.00000000000000000000005	0.00000000000000000000005	kg	1.00	0.00000000000000000000005
78. 0.000000000000000000000025	0.000000000000000000000025	kg	1.00	0.000000000000000000000025
79. 0.000000000000000000000012	0.000000000000000000000012	kg	1.00	0.000000000000000000000012
80. 0.000000000000000000000006	0.000000000000000000000006	kg	1.00	0.000000000000000000000006
81. 0.000000000000000000000003	0.000000000000000000000003	kg	1.00	0.000000000000000000000003
82. 0.000000000000000000000001	0.000000000000000000000001	kg	1.00	0.000000000000000000000001
83. 0.0000000000000000000000005	0.0000000000000000000000005	kg	1.00	0.0000000000000000000000005
84. 0.00000000000000000000000025	0.00000000000000000000000025	kg	1.00	0.00000000000000000000000025
85. 0.00000000000000000000000012	0.00000000000000000000000012	kg	1.00	0.00000000000000000000000012
86. 0.00000000000000000000000006	0.00000000000000000000000006	kg	1.00	0.00000000000000000000000006
87. 0.00000000000000000000000003	0.00000000000000000000000003	kg	1.00	0.00000000000000000000000003
88. 0.00000000000000000000000001	0.00000000000000000000000001	kg	1.00	0.00000000000000000000000001
89. 0.000000000000000000000000005	0.000000000000000000000000005	kg	1.00	0.000000000000000000000000005
90. 0.0000000000000000000000000025	0.0000000000000000000000000025	kg	1.00	0.0000000000000000000000000025
91. 0.0000000000000000000000000012	0.0000000000000000000000000012	kg	1.00	0.0000000000000000000000000012
92. 0.0000000000000000000000000006	0.0000000000000000000000000006	kg	1.00	0.0000000000000000000000000006
93. 0.0000000000000000000000000003	0.0000000000000000000000000003	kg	1.00	0.0000000000000000000000000003
94. 0.0000000000000000000000000001	0.0000000000000000000000000001	kg	1.00	0.0000000000000000000000000001
95. 0.00000000000000000000000000005	0.00000000000000000000000000005	kg	1.00	0.00000000000000000000000000005
96. 0.000000000000000000000000000025	0.000000000000000000000000000025	kg	1.00	0.000000000000000000000000000025
97. 0.000000000000000000000000000012	0.000000000000000000000000000012	kg	1.00	0.000000000000000000000000000012
98. 0.000000000000000000000000000006	0.000000000000000000000000000006	kg	1.00	0.000000000000000000000000000006
99. 0.000000000000000000000000000003	0.000000000000000000000000000003	kg	1.00	0.000000000000000000000000000003
100. 0.000000000000000000000000000001	0.000000000000000000000000000001	kg	1.00	0.000000000000000000000000000001



RESEARCH DESIGN AND METHODS

Study	Year	Country	Sample Size	Design	Intervention	Comparison	Outcome	Effect Size	Quality
1. Smith et al.	2018	USA	120	RCT	Group A	Group B	Primary	0.15	High
2. Jones et al.	2019	UK	150	RCT	Group A	Group B	Primary	0.12	High
3. Brown et al.	2020	Canada	180	RCT	Group A	Group B	Primary	0.18	High
4. White et al.	2021	Australia	200	RCT	Group A	Group B	Primary	0.14	High
5. Black et al.	2022	Germany	220	RCT	Group A	Group B	Primary	0.16	High
6. Green et al.	2023	France	240	RCT	Group A	Group B	Primary	0.17	High
7. Grey et al.	2024	Italy	260	RCT	Group A	Group B	Primary	0.19	High
8. Yellow et al.	2025	Spain	280	RCT	Group A	Group B	Primary	0.20	High
9. Purple et al.	2026	Japan	300	RCT	Group A	Group B	Primary	0.21	High
10. Blue et al.	2027	India	320	RCT	Group A	Group B	Primary	0.22	High
11. Orange et al.	2028	Brazil	340	RCT	Group A	Group B	Primary	0.23	High
12. Pink et al.	2029	South Africa	360	RCT	Group A	Group B	Primary	0.24	High
13. Brown et al.	2030	USA	380	RCT	Group A	Group B	Primary	0.25	High
14. White et al.	2031	UK	400	RCT	Group A	Group B	Primary	0.26	High
15. Black et al.	2032	Canada	420	RCT	Group A	Group B	Primary	0.27	High
16. Green et al.	2033	Australia	440	RCT	Group A	Group B	Primary	0.28	High
17. Grey et al.	2034	Germany	460	RCT	Group A	Group B	Primary	0.29	High
18. Yellow et al.	2035	France	480	RCT	Group A	Group B	Primary	0.30	High
19. Purple et al.	2036	Italy	500	RCT	Group A	Group B	Primary	0.31	High
20. Blue et al.	2037	Spain	520	RCT	Group A	Group B	Primary	0.32	High
21. Orange et al.	2038	Japan	540	RCT	Group A	Group B	Primary	0.33	High
22. Pink et al.	2039	India	560	RCT	Group A	Group B	Primary	0.34	High
23. Brown et al.	2040	Brazil	580	RCT	Group A	Group B	Primary	0.35	High
24. White et al.	2041	South Africa	600	RCT	Group A	Group B	Primary	0.36	High
25. Black et al.	2042	USA	620	RCT	Group A	Group B	Primary	0.37	High
26. Green et al.	2043	UK	640	RCT	Group A	Group B	Primary	0.38	High
27. Grey et al.	2044	Canada	660	RCT	Group A	Group B	Primary	0.39	High
28. Yellow et al.	2045	Australia	680	RCT	Group A	Group B	Primary	0.40	High
29. Purple et al.	2046	Germany	700	RCT	Group A	Group B	Primary	0.41	High
30. Blue et al.	2047	France	720	RCT	Group A	Group B	Primary	0.42	High
31. Orange et al.	2048	Italy	740	RCT	Group A	Group B	Primary	0.43	High
32. Pink et al.	2049	Spain	760	RCT	Group A	Group B	Primary	0.44	High
33. Brown et al.	2050	Japan	780	RCT	Group A	Group B	Primary	0.45	High
34. White et al.	2051	India	800	RCT	Group A	Group B	Primary	0.46	High
35. Black et al.	2052	Brazil	820	RCT	Group A	Group B	Primary	0.47	High
36. Green et al.	2053	South Africa	840	RCT	Group A	Group B	Primary	0.48	High
37. Grey et al.	2054	USA	860	RCT	Group A	Group B	Primary	0.49	High
38. Yellow et al.	2055	UK	880	RCT	Group A	Group B	Primary	0.50	High
39. Purple et al.	2056	Canada	900	RCT	Group A	Group B	Primary	0.51	High
40. Blue et al.	2057	Australia	920	RCT	Group A	Group B	Primary	0.52	High
41. Orange et al.	2058	Germany	940	RCT	Group A	Group B	Primary	0.53	High
42. Pink et al.	2059	France	960	RCT	Group A	Group B	Primary	0.54	High
43. Brown et al.	2060	Italy	980	RCT	Group A	Group B	Primary	0.55	High
44. White et al.	2061	Spain	1000	RCT	Group A	Group B	Primary	0.56	High
45. Black et al.	2062	Japan	1020	RCT	Group A	Group B	Primary	0.57	High
46. Green et al.	2063	India	1040	RCT	Group A	Group B	Primary	0.58	High
47. Grey et al.	2064	Brazil	1060	RCT	Group A	Group B	Primary	0.59	High
48. Yellow et al.	2065	South Africa	1080	RCT	Group A	Group B	Primary	0.60	High
49. Purple et al.	2066	USA	1100	RCT	Group A	Group B	Primary	0.61	High
50. Blue et al.	2067	UK	1120	RCT	Group A	Group B	Primary	0.62	High
51. Orange et al.	2068	Canada	1140	RCT	Group A	Group B	Primary	0.63	High
52. Pink et al.	2069	Australia	1160	RCT	Group A	Group B	Primary	0.64	High
53. Brown et al.	2070	Germany	1180	RCT	Group A	Group B	Primary	0.65	High
54. White et al.	2071	France	1200	RCT	Group A	Group B	Primary	0.66	High
55. Black et al.	2072	Italy	1220	RCT	Group A	Group B	Primary	0.67	High
56. Green et al.	2073	Spain	1240	RCT	Group A	Group B	Primary	0.68	High
57. Grey et al.	2074	Japan	1260	RCT	Group A	Group B	Primary	0.69	High
58. Yellow et al.	2075	India	1280	RCT	Group A	Group B	Primary	0.70	High
59. Purple et al.	2076	Brazil	1300	RCT	Group A	Group B	Primary	0.71	High
60. Blue et al.	2077	South Africa	1320	RCT	Group A	Group B	Primary	0.72	High
61. Orange et al.	2078	USA	1340	RCT	Group A	Group B	Primary	0.73	High
62. Pink et al.	2079	UK	1360	RCT	Group A	Group B	Primary	0.74	High
63. Brown et al.	2080	Canada	1380	RCT	Group A	Group B	Primary	0.75	High
64. White et al.	2081	Australia	1400	RCT	Group A	Group B	Primary	0.76	High
65. Black et al.	2082	Germany	1420	RCT	Group A	Group B	Primary	0.77	High
66. Green et al.	2083	France	1440	RCT	Group A	Group B	Primary	0.78	High
67. Grey et al.	2084	Italy	1460	RCT	Group A	Group B	Primary	0.79	High
68. Yellow et al.	2085	Spain	1480	RCT	Group A	Group B	Primary	0.80	High
69. Purple et al.	2086	Japan	1500	RCT	Group A	Group B	Primary	0.81	High
70. Blue et al.	2087	India	1520	RCT	Group A	Group B	Primary	0.82	High
71. Orange et al.	2088	Brazil	1540	RCT	Group A	Group B	Primary	0.83	High
72. Pink et al.	2089	South Africa	1560	RCT	Group A	Group B	Primary	0.84	High
73. Brown et al.	2090	USA	1580	RCT	Group A	Group B	Primary	0.85	High
74. White et al.	2091	UK	1600	RCT	Group A	Group B	Primary	0.86	High
75. Black et al.	2092	Canada	1620	RCT	Group A	Group B	Primary	0.87	High
76. Green et al.	2093	Australia	1640	RCT	Group A	Group B	Primary	0.88	High
77. Grey et al.	2094	Germany	1660	RCT	Group A	Group B	Primary	0.89	High
78. Yellow et al.	2095	France	1680	RCT	Group A	Group B	Primary	0.90	High
79. Purple et al.	2096	Italy	1700	RCT	Group A	Group B	Primary	0.91	High
80. Blue et al.	2097	Spain	1720	RCT	Group A	Group B	Primary	0.92	High
81. Orange et al.	2098	Japan	1740	RCT	Group A	Group B	Primary	0.93	High
82. Pink et al.	2099	India	1760	RCT	Group A	Group B	Primary	0.94	High
83. Brown et al.	2100	Brazil	1780	RCT	Group A	Group B	Primary	0.95	High
84. White et al.	2101	South Africa	1800	RCT	Group A	Group B	Primary	0.96	High
85. Black et al.	2102	USA	1820	RCT	Group A	Group B	Primary	0.97	High
86. Green et al.	2103	UK	1840	RCT	Group A	Group B	Primary	0.98	High
87. Grey et al.	2104	Canada	1860	RCT	Group A	Group B	Primary	0.99	High
88. Yellow et al.	2105	Australia	1880	RCT	Group A	Group B	Primary	1.00	High
89. Purple et al.	2106	Germany	1900	RCT	Group A	Group B	Primary	1.01	High
90. Blue et al.	2107	France	1920	RCT	Group A	Group B	Primary	1.02	High
91. Orange et al.	2108	Italy	1940	RCT	Group A	Group B	Primary	1.03	High
92. Pink et al.	2109	Spain	1960	RCT	Group A	Group B	Primary	1.04	High
93. Brown et al.	2110	Japan	1980	RCT	Group A	Group B	Primary	1.05	High
94. White et al.	2111	India	2000	RCT	Group A	Group B	Primary	1.06	High
95. Black et al.	2112	Brazil	2020	RCT	Group A	Group B	Primary	1.07	High
96. Green et al.	2113	South Africa	2040	RCT	Group A	Group B	Primary	1.08	High
97. Grey et al.	2114	USA	2060	RCT	Group A	Group B	Primary	1.09	High
98. Yellow et al.	2115	UK	2080	RCT	Group A	Group B	Primary	1.10	High
99. Purple et al.	2116	Canada	2100	RCT	Group A	Group B	Primary	1.11	High
100. Blue et al.	2117	Australia	2120	RCT	Group A	Group B	Primary	1.12	High

RESEARCH LOCAL BUSINESS FINANCIAL STATEMENTS

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Revenue												
Cost of Sales												
Gross Profit												
Operating Expenses												
Operating Income												
Interest Expense												
Income Before Tax												
Tax Expense												
Net Income												
Other Income												
Other Expenses												
Net Income (Loss)												

RESEARCH DESIGN AND METHODS

Study	Study Design			Study Population			Intervention			Outcome		
	Design	Setting	Duration	Sample Size	Inclusion Criteria	Exclusion Criteria	Intervention	Control	Duration	Primary Outcome	Secondary Outcome	Statistical Analysis
1. Smith et al. (2018)	RCT	Community	12 weeks	150	>18 years	None	Group A	Group B	12 weeks	Weight loss	Quality of life	ANCOVA
2. Jones et al. (2019)	Quasi-experimental	Workplace	6 months	200	>18 years	Chronic disease	Group C	Group D	6 months	Productivity	Stress levels	T-test
3. Brown et al. (2020)	Observational	Home	3 months	80	>18 years	None	Group E	Group F	3 months	Adherence	Healthcare costs	Chi-square
4. White et al. (2021)	RCT	Community	18 weeks	250	>18 years	None	Group G	Group H	18 weeks	Weight loss	Quality of life	ANCOVA
5. Black et al. (2022)	Quasi-experimental	Workplace	9 months	300	>18 years	Chronic disease	Group I	Group J	9 months	Productivity	Stress levels	T-test



REVENUE BUDGET (ESTIMATED) 2014-2015

Category	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget
General Fund														
Administrative														
Capital														
Community Development														
Economic Development														
Finance														
Health														
Housing														
Public Works														
Social Services														
Total														
Special Districts														
Fire														
Police														
Public Works														
Total														
Other														
Total														



RESEARCH DESIGN AND METHODS

Phase	Method	Instrument	Procedure	Sampling	Data Analysis
Phase I: Literature Review	Search	Handbook of Research Methods in Psychology	Identify relevant studies	Peer-reviewed journals	Qualitative synthesis
	Selection	PRISMA 2020	Screening titles and abstracts	English language	Thematic analysis
Phase II: Data Collection	Survey	Questionnaire	Distribution to participants	Convenience sample	Quantitative analysis
	Interview	Semi-structured	One-on-one sessions	Purposive sampling	Qualitative analysis
Phase III: Data Analysis	Statistical	SPSS	Descriptive and inferential statistics	Random sampling	Quantitative analysis
	Qualitative	Content analysis	Thematic analysis	Purposive sampling	Qualitative analysis
Phase IV: Reporting	Writing	Research report	Final synthesis	Peer-reviewed journals	Qualitative synthesis
	Dissemination	Conference presentation	Presenting findings	Academic conferences	Qualitative synthesis

REVISIONS TO THE FINANCIAL STATEMENTS	2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		
	Revenue	Expenses	Revenue	Expenses	Revenue	Expenses	Revenue	Expenses	Revenue	Expenses	Revenue	Expenses	Revenue	Expenses	Revenue	Expenses	Revenue	Expenses	Revenue	Expenses	Revenue	Expenses	
1. Revenue																							
2. Expenses																							
3. Net Income																							
4. Total Assets																							
5. Total Liabilities																							
6. Total Equity																							
7. Total Revenue																							
8. Total Expenses																							
9. Total Net Income																							
10. Total Assets																							
11. Total Liabilities																							
12. Total Equity																							
13. Total Revenue																							
14. Total Expenses																							
15. Total Net Income																							

Research Design	Sampling	Data Collection	Data Analysis	Strengths	Weaknesses
Experimental	Random	Quantitative	Statistical	High internal validity	Low external validity
Quasi-experimental	Convenience	Quantitative	Statistical	High internal validity	Low external validity
Correlational	Convenience	Quantitative	Statistical	High external validity	Low internal validity
Case study	Purposive	Qualitative	Thematic	High internal validity	Low external validity
Ethnography	Purposive	Qualitative	Thematic	High external validity	Low internal validity
Grounded theory	Purposive	Qualitative	Thematic	High internal validity	Low external validity
Phenomenology	Purposive	Qualitative	Thematic	High internal validity	Low external validity
Content analysis	Convenience	Quantitative	Statistical	High external validity	Low internal validity
Discourse analysis	Purposive	Qualitative	Thematic	High internal validity	Low external validity
Focus groups	Convenience	Qualitative	Thematic	High external validity	Low internal validity
Interviews	Purposive	Qualitative	Thematic	High internal validity	Low external validity
Surveys	Convenience	Quantitative	Statistical	High external validity	Low internal validity
Diaries	Purposive	Qualitative	Thematic	High internal validity	Low external validity
Observations	Purposive	Qualitative	Thematic	High external validity	Low internal validity

RESEARCH DESIGN AND METHODS

Study	Year	Design	Sample	Intervention	Outcome	Quality
1	2018	Randomized Controlled Trial	1000	Intervention A	Primary Outcome	High
2	2019	Observational Cohort Study	500	Intervention B	Secondary Outcome	Medium
3	2020	Systematic Review	15	Intervention C	Meta-analysis	High
4	2021	Quasi-experimental Study	200	Intervention D	Primary Outcome	Medium
5	2022	Randomized Controlled Trial	800	Intervention E	Secondary Outcome	High

Problem	Equation	Graph	Intercept	Slope	Line
1	$y = 2x + 3$		3	2	Line
2	$y = -x + 5$		5	-1	Line
3	$y = 0.5x + 1$		1	0.5	Line
4	$y = -2x - 4$		-4	-2	Line
5	$y = 3x - 6$		-6	3	Line
6	$y = 1.5x + 2$		2	1.5	Line
7	$y = -0.5x + 4$		4	-0.5	Line
8	$y = 2.5x - 1$		-1	2.5	Line
9	$y = -1.5x + 3$		3	-1.5	Line
10	$y = 0.75x + 1.5$		1.5	0.75	Line

Equation	$m$	$b$	$x$	$y$	Graph
$y = 2x + 3$	2	3	0	3	
$y = -3x + 1$	-3	1	0	1	
$y = 4x - 2$	4	-2	0	-2	
$y = -1x + 5$	-1	5	0	5	
$y = 0.5x + 2$	0.5	2	0	2	
$y = -2x - 1$	-2	-1	0	-1	
$y = 3x + 4$	3	4	0	4	
$y = -4x + 1$	-4	1	0	1	
$y = 1.5x - 3$	1.5	-3	0	-3	
$y = -0.5x + 2$	-0.5	2	0	2	
$y = 2x + 1$	2	1	0	1	
$y = -1x - 2$	-1	-2	0	-2	
$y = 0.7x + 3$	0.7	3	0	3	
$y = -2.5x + 1$	-2.5	1	0	1	
$y = 3.5x - 4$	3.5	-4	0	-4	
$y = -1.2x + 2$	-1.2	2	0	2	

Worksheet: Linear Equations in Two Variables

Problem	Line 1		Line 2		Graph	Line 1		Line 2		Graph
	$m$	$b$	$m$	$b$		$m$	$b$	$m$	$b$	
1. Write the equation of the line passing through the points $(-2, 3)$ and $(1, 5)$ .										
2. Write the equation of the line passing through the points $(-1, 2)$ and $(3, 4)$ .										
3. Write the equation of the line passing through the points $(-3, 1)$ and $(0, 4)$ .										
4. Write the equation of the line passing through the points $(-4, 2)$ and $(1, 5)$ .										
5. Write the equation of the line passing through the points $(-5, 3)$ and $(2, 6)$ .										
6. Write the equation of the line passing through the points $(-6, 4)$ and $(3, 7)$ .										
7. Write the equation of the line passing through the points $(-7, 5)$ and $(4, 8)$ .										
8. Write the equation of the line passing through the points $(-8, 6)$ and $(5, 9)$ .										
9. Write the equation of the line passing through the points $(-9, 7)$ and $(6, 10)$ .										
10. Write the equation of the line passing through the points $(-10, 8)$ and $(7, 11)$ .										

RESEARCH DESIGN AND METHODS

Study	Study Design			Study Population			Intervention			Outcome		
	Year	Country	Design	Sample Size	Age Range	Gender	Duration	Group	Intervention	Control	Primary	Secondary
1	2018	USA	Randomized Controlled Trial	1000	18-65	50% M, 50% F	12 weeks	Intervention	Control	Primary	Secondary	
2	2019	UK	Observational Cohort Study	5000	20-80	45% M, 55% F	5 years	Intervention	Control	Primary	Secondary	
3	2020	Canada	Quasi-Experimental Study	2000	15-75	50% M, 50% F	8 weeks	Intervention	Control	Primary	Secondary	
4	2021	Australia	Randomized Controlled Trial	1500	25-70	50% M, 50% F	10 weeks	Intervention	Control	Primary	Secondary	
5	2022	Germany	Observational Cohort Study	3000	30-90	40% M, 60% F	3 years	Intervention	Control	Primary	Secondary	

No.	Description of Work	Phase I				Phase II				Phase III			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	...												
2	...												
3	...												
4	...												
5	...												
6	...												
7	...												
8	...												
9	...												
10	...												
11	...												
12	...												
13	...												
14	...												
15	...												
16	...												
17	...												
18	...												
19	...												
20	...												
21	...												
22	...												
23	...												
24	...												
25	...												
26	...												
27	...												
28	...												
29	...												
30	...												
31	...												
32	...												
33	...												
34	...												
35	...												
36	...												
37	...												
38	...												
39	...												
40	...												
41	...												
42	...												
43	...												
44	...												
45	...												
46	...												
47	...												
48	...												
49	...												
50	...												
51	...												
52	...												
53	...												
54	...												
55	...												
56	...												
57	...												
58	...												
59	...												
60	...												
61	...												
62	...												
63	...												
64	...												
65	...												
66	...												
67	...												
68	...												
69	...												
70	...												
71	...												
72	...												
73	...												
74	...												
75	...												
76	...												
77	...												
78	...												
79	...												
80	...												
81	...												
82	...												
83	...												
84	...												
85	...												
86	...												
87	...												
88	...												
89	...												
90	...												
91	...												
92	...												
93	...												
94	...												
95	...												
96	...												
97	...												
98	...												
99	...												
100	...												

Equation	Line 1	Line 2	Line 3	Line 4	Line 5	Line 6	Line 7	Line 8	Line 9	Line 10	Line 11	Line 12	Line 13	Line 14	Line 15	Line 16	Line 17	Line 18	Line 19	Line 20
$y = 2x + 3$																				
$y = -x + 5$																				
$y = 3x - 2$																				
$y = -2x + 1$																				
$y = x + 4$																				
$y = -3x + 7$																				
$y = 4x - 5$																				
$y = -4x + 2$																				
$y = x - 6$																				
$y = -5x + 8$																				
$y = 6x - 9$																				
$y = -6x + 3$																				
$y = 7x - 4$																				
$y = -7x + 1$																				
$y = 8x - 7$																				
$y = -8x + 5$																				
$y = 9x - 8$																				
$y = -9x + 4$																				
$y = 10x - 6$																				
$y = -10x + 2$																				
$y = 11x - 9$																				
$y = -11x + 6$																				
$y = 12x - 7$																				
$y = -12x + 3$																				
$y = 13x - 8$																				
$y = -13x + 5$																				
$y = 14x - 9$																				
$y = -14x + 4$																				
$y = 15x - 7$																				
$y = -15x + 6$																				
$y = 16x - 8$																				
$y = -16x + 3$																				
$y = 17x - 9$																				
$y = -17x + 5$																				
$y = 18x - 7$																				
$y = -18x + 4$																				
$y = 19x - 8$																				
$y = -19x + 6$																				
$y = 20x - 9$																				
$y = -20x + 5$																				

RESEARCH DESIGN AND METHODS

Study ID	Author(s)	Year	Country	Sample Size (n)	Age Range (years)	Gender	Education Level	Prevalence (%)		Prevalence Ratio		Prevalence Ratio	
								Prevalence (%)	95% CI	Prevalence Ratio	95% CI	Prevalence Ratio	95% CI
1	Smith et al.	2018	USA	1200	18-65	50%		1.0		1.0		1.0	
2	Johnson et al.	2019	UK	800	20-70	60%		1.2		1.2		1.2	
3	Chen et al.	2020	China	1500	15-80	45%		0.9		0.9		0.9	
4	Lee et al.	2021	South Korea	900	25-75	55%		1.1		1.1		1.1	
5	Patel et al.	2022	India	1100	18-60	40%		0.8		0.8		0.8	
6	Wang et al.	2023	Japan	700	20-80	65%		1.3		1.3		1.3	
7	Nguyen et al.	2024	Vietnam	1300	15-70	50%		1.0		1.0		1.0	
8	Alvarez et al.	2025	Spain	600	25-75	55%		1.1		1.1		1.1	
9	Kim et al.	2026	South Korea	850	18-80	60%		1.2		1.2		1.2	
10	Roberts et al.	2027	Australia	950	20-70	50%		1.0		1.0		1.0	
11	Costa et al.	2028	Brazil	1050	15-75	45%		0.9		0.9		0.9	
12	Miller et al.	2029	USA	1150	18-70	55%		1.1		1.1		1.1	
13	Nguyen et al.	2030	Vietnam	1250	20-80	50%		1.0		1.0		1.0	
14	Patel et al.	2031	India	1000	15-75	40%		0.8		0.8		0.8	
15	Wang et al.	2032	China	1400	18-80	50%		1.0		1.0		1.0	
16	Lee et al.	2033	South Korea	800	20-70	55%		1.1		1.1		1.1	
17	Chen et al.	2034	China	1300	15-75	45%		0.9		0.9		0.9	
18	Nguyen et al.	2035	Vietnam	1100	18-80	50%		1.0		1.0		1.0	
19	Alvarez et al.	2036	Spain	700	25-75	55%		1.1		1.1		1.1	
20	Kim et al.	2037	South Korea	850	18-70	60%		1.2		1.2		1.2	
21	Roberts et al.	2038	Australia	950	20-70	50%		1.0		1.0		1.0	
22	Costa et al.	2039	Brazil	1050	15-75	45%		0.9		0.9		0.9	
23	Miller et al.	2040	USA	1150	18-70	55%		1.1		1.1		1.1	
24	Nguyen et al.	2041	Vietnam	1250	20-80	50%		1.0		1.0		1.0	
25	Patel et al.	2042	India	1000	15-75	40%		0.8		0.8		0.8	
26	Wang et al.	2043	China	1400	18-80	50%		1.0		1.0		1.0	
27	Lee et al.	2044	South Korea	800	20-70	55%		1.1		1.1		1.1	
28	Chen et al.	2045	China	1300	15-75	45%		0.9		0.9		0.9	
29	Nguyen et al.	2046	Vietnam	1100	18-80	50%		1.0		1.0		1.0	
30	Alvarez et al.	2047	Spain	700	25-75	55%		1.1		1.1		1.1	
31	Kim et al.	2048	South Korea	850	18-70	60%		1.2		1.2		1.2	
32	Roberts et al.	2049	Australia	950	20-70	50%		1.0		1.0		1.0	
33	Costa et al.	2050	Brazil	1050	15-75	45%		0.9		0.9		0.9	

Total program yang dilaksanakan dan direncanakan di lingkungan Hidup Kabupaten Jombang pada tahun 2019-2020 sebanyak 4 program. Untuk tahun lanjutan program dan kegiatan dilaksanakan sebagai 4 tahun. Hal ini disebabkan adanya perubahan Kementerian sbbet penerapan Permendagri 90 Tahun 2019 sehingga pada tahun 2021 mengalami perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan. Pada tahun 2021 jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 7 program. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 8 dan ini karena adanya tambahan sub kegiatan baru Pembangunan TPGR yang semula bersumber dari DAK. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami perubahan kembali karena adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 660-669 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemrosesuran Klasifikasi, Kodifikasi dan Homologasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga seluruh indikator sub kegiatan mengalami penyusunan kembali. Namun jumlah program yang dilaksanakan masih sebanyak 8 program.

Indikator kinerja utama pada tahun 2020 hampir seluruhnya mencapai target hanya saja untuk target Peningkatan Sempah belum tercapai optimal. Hal ini karena target penanganan sampah yang ditargetkan sebesar 111,78 Ton/hari hanya teraklasi sebesar 115,44 Ton/hari. Pada tahun 2021-2022 seluruh indikator Kinerja Utama hampir seluruhnya melebihi target. Sedangkan pada tahun 2023 untuk capaian Indeks Kualitas Air (IKA) belum tercapai secara optimal hal ini dikarenakan masih banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi seperti kondisi curah hujan dan pola hidup masyarakat sehingga upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga Kualitas Air belum optimal. Pada tahun 2024 hampir

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

berikut target sasaran, strategi, program, kegiatan dan sub-kegiatan tercapai berdasarkan rencana kinerja tahun 2024 dan 2025 seperti seluruhnya telah mencapai target dengan hasil capaian realisasi 100%.

Uraian mengenai anggaran dan realisasinya disajikan tersendiri sesuai tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 1.1  
 Definisi dan Klasifikasi Penyakit Menular Seksual (PMS) Menurut WHO

No	Nama Penyakit	Klasifikasi				Gejala	Diagnosis	Penyakit
		Definisi	Gejala	Diagnosis	Penyakit			
1	Chlamydia							
2	Gonorrhea							
3	Herpes Simplex Virus (HSV)							
4	Human Immunodeficiency Virus (HIV)							
5	Human Papillomavirus (HPV)							
6	Trichomonas vaginalis							
7	Syphilis							
8	Neisseria meningitidis							
9	Neisseria gonorrhoeae							
10	Chlamydia trachomatis							
11	Chlamydia pneumoniae							
12	Chlamydia psittaci							
13	Chlamydia felis							
14	Chlamydia abortus							
15	Chlamydia psittaci							
16	Chlamydia psittaci							
17	Chlamydia psittaci							
18	Chlamydia psittaci							
19	Chlamydia psittaci							
20	Chlamydia psittaci							
21	Chlamydia psittaci							
22	Chlamydia psittaci							
23	Chlamydia psittaci							
24	Chlamydia psittaci							
25	Chlamydia psittaci							
26	Chlamydia psittaci							
27	Chlamydia psittaci							
28	Chlamydia psittaci							
29	Chlamydia psittaci							
30	Chlamydia psittaci							
31	Chlamydia psittaci							
32	Chlamydia psittaci							
33	Chlamydia psittaci							
34	Chlamydia psittaci							
35	Chlamydia psittaci							
36	Chlamydia psittaci							
37	Chlamydia psittaci							
38	Chlamydia psittaci							
39	Chlamydia psittaci							
40	Chlamydia psittaci							
41	Chlamydia psittaci							
42	Chlamydia psittaci							
43	Chlamydia psittaci							
44	Chlamydia psittaci							
45	Chlamydia psittaci							
46	Chlamydia psittaci							
47	Chlamydia psittaci							
48	Chlamydia psittaci							
49	Chlamydia psittaci							
50	Chlamydia psittaci							

No	Nama	Jenis Kelamin			Jumlah	Agama			Jumlah	Pendidikan			Jumlah
		Pria	Wanita	Jumlah		Islam	Kristen	Lain-lain		SD	SLTP	SLTA	
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
48	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
49	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
50	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

**PERUSAHAAN BERKAWAL NEGARA**

Kategori	Perusahaan Berkeadilan				Perusahaan Berkeadilan				Perusahaan Berkeadilan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Jumlah Perusahaan Berkeadilan										
2. Jumlah Perusahaan Berkeadilan yang Berkeadilan										
3. Jumlah Perusahaan Berkeadilan yang Tidak Berkeadilan										
4. Jumlah Perusahaan Berkeadilan yang Tidak Berkeadilan yang Tidak Berkeadilan										
5. Jumlah Perusahaan Berkeadilan yang Tidak Berkeadilan yang Tidak Berkeadilan										
6. Jumlah Perusahaan Berkeadilan yang Tidak Berkeadilan yang Tidak Berkeadilan										
7. Jumlah Perusahaan Berkeadilan yang Tidak Berkeadilan yang Tidak Berkeadilan										
8. Jumlah Perusahaan Berkeadilan yang Tidak Berkeadilan yang Tidak Berkeadilan										
9. Jumlah Perusahaan Berkeadilan yang Tidak Berkeadilan yang Tidak Berkeadilan										
10. Jumlah Perusahaan Berkeadilan yang Tidak Berkeadilan yang Tidak Berkeadilan										

Salah satu pendekatan dalam analisis sistem kesehatan masyarakat yang sering

Kategori Masalah	Gejala					Penyakit					Faktor Risiko				Dampak	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1																
2																
3																
4																

Tahun 2020-2024 hampir seluruh realisasi anggaran di atas 90%. Hanya ada ada beberapa program yang impiantanya dibawah 90% akibatnya di tahun 2020. Program yang impiantanya di bawah 90% rata-rata disebabkan oleh faktor eksternal. Dimana adalah sebagai berikut:

- Salah satu antara nilai lelang atau kontrak atau pengadaan dengan anggaran.
- Terdapat anggaran merupakan nilai yang tidak bisa diserap karena merupakan secara gap untuk mencapai minimal 90% perubahan jumlah penanah anggaran, pegawai pemilih, dan lain-lain.
- Kegiatan yang bersifat wajib dianggarkan dalam rangkai memenuhi tanggung jawab atas kerja sama dengan pihak lain, seperti anggaran untuk pembelian lahan TPA dan SPJIS tenaga kasar. Kegiatan kegiatan tersebut ini tetap dianggarkan secara dengan komitmen yang dibuat meliputi realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat.

Berikut dengan target pada dan juga Dinas Lingkungan Hidup, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh dalam optimal dilaksanakan karena keterbatasan jumlah SDM dan anggaran.

#### 3.1.4 Kelengkapan sarana layanan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang merupakan salah satu instansi pemerintahan di tingkat lingkungan hidup. Pada salah satu instansi pemerintahan di tingkat lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang berperan dalam melaksanakan pengurusan lingkungan hidup, mengelola wilayahnya pemerintahan lingkungan hidup, memelihara sarana-sarana dalam pemerintahan lingkungan hidup, mengelola wilayahnya

usia terkait pengelolaan lingkungan hidup serta meningkatkan pengabdian keaspek pencemaran dan menyuarakan keaspek pencemaran tersebut serta menangani masalah di bidang perikanan. Dalam meningkatkan pelayanan pengabdian keaspek pencemaran lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menerima pengabdian secara online di Website maupun Sosial Media. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang bergiat untuk masyarakat meliputi yakni keaspek pencemaran lingkungan hidup di lingkungannya sekitar unit usaha kerja. Selain urusan pemerintahan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang juga memiliki UPTD Laboratorium Lingkungan yang berperan dalam memberikan pelayanan yakni jasa pengujian parameter pengujian meliputi nilai kualitas lingkungan hidup dan UPTD Pengelolaan Sampah yang berperan dalam mengelola sampah yang ada di TPA.

1. Jenis Fasilitas pelayanan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang diantaranya adalah :
  - a) Fasilitas Penertiban Persewaan Lingkungan
  - b) Fasilitas Penertiban Persewaan Teknis/Misalnya, Teknis/SLD
  - c) Fasilitas Rekomendasi Persewaan Pohon/Persewaan Pohon
  - d) Fasilitas Pengawasan Sampah
  - e) Fasilitas Pengawasan Resto Sampah
  - f) Fasilitas Uji Pembebasan Wangi Tembak Hija
  - g) Fasilitas Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan Laboratorium
  - h) Fasilitas Pemukiman Wadiah Airnya
  - i) Fasilitas Pelayanan Kependudukan Terpadu KUBD

2. Mitra Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pelayanan diantaranya sebagai berikut :

- a. Fasilitas Rekomendasi Pemotongan Jalan/Pemangkasan Jalan bermitra dengan Dinas PUPR untuk wilayah di luar Kecamatan Jombang sesuai dengan kewenangan jalan.
- b. Fasilitas Pengangkutan Sampah bermitra dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) selaku pengelola TPSR di tingkat Desa.
- c. Fasilitas Pembinaan Sekolah Adhivitas bermitra dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta Kementerian Agama selaku Dinas yang menaungi sekolah-sekolah maupun madrasah.
- d. Fasilitas Pelayanan Elektromikro Transmisi Nelayan bermitra dengan PD Pengaliran dan PT. Indonesia Power. Transmisi Nelayan terletak di area milik PD Pengaliran sehingga pelayanan dilakukan melalui MUI antara PD Pengaliran dengan Pemkab Jombang terkait Pengaliran Lahan Milik PD Pengaliran sebagai Transmisi Nelayan. Selain itu, Pekerjaan Nelayanan (PKN) antara PT. Indonesia Power dengan Pemkab Jombang dalam pengelolaan KEMATI dan tahun 2021-2025 melalui jasa pemeliharaan Transmisi Nelayan Transmisi untuk urusan pengaliran dan pemeliharaan saluran selanjutnya sebagai kegiatan yang dilulus dalam waktu 10 hari setelah terputus pengaliran. Untuk perbaikan/peningkatan seperti kelompok masyarakat terkait produk aquaculture, penerapan mutu integritas fish dan fisher serta KEMATI Transmisi, monitoring dan evaluasi keberlanjutan

layani, serta publikasi dan promosi untuk meningkatkan kunjungan di Taman Kebun Wisata.

- a. Pelaksanaan Program FS Terpadu (Pengembangan, Pemeliharaan dan Penguatan Sentra KDM Blok Alurrahman Terpadu) mampu membangun jaringan kerja 10 CFD dalam lingkup Provinsi Jombang (Dappoda, DLH, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan, DPMD dan Satpol PP) kemudian bekerjasama dengan stakeholder terkait sesuai kewenangannya, mulai Pemerintah Desa, Provinsi, Kementerian/Lembaga, unit/instansi penyangga, universitas, LSM, DPR dan sektor swasta dalam hal ini adalah 3 transporter LBB, yaitu PT. Surya Wijaya Megati, PT. Triana Mula Indonesia dan PT. Mestika Hartono Jaya, ICEL (Indonesia Center for Environment Care) dan PT Dana Indonesia dengan upaya untuk mengungkap permasalahan lingkungan sekitar dan eliminasi untuk menjaga keberlanjutan alamnya masyarakat akan bertak

- ✓ Peningkatan lain adalah 40 petak untuk bergabung dengan kapasitas 6 petak sendiri, 20 dalam penanaman dan 100 industri tetap karena bisa mampu memenuhinya.
- ✓ Peningkatan pemantauan lingkungan melalui pemantauan 7 titik terintegrasi limbah B3 (LBB) dan pemantauan sistem sungai bahan beracun.
- ✓ Peningkatan media cetak melalui rencana cetak dan penanaman dan penanaman 2 (dua) petak untuk pemantauan lingkungan.

### 2. Dukungan BUMN dalam pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Dalam mendukung kinerja capaian pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember membangun kerjasama dengan PT Usaha Sagar dengan membuat sebuah aplikasi **BERSIH SAMPAH** aplikasi tersebut digunakan oleh Hebatok Bank Sampah serta pengaduan hasil limbah sampah. Selain **BERSIH SAMPAH** bisa disebut dalam bentuk tanai maupun barang di toko-toko UMKM yang telah menjadi mitra Bank Sampah. Selain **BERSIH SAMPAH**, PT Usaha Sagar juga sebagai mitra Operator RDP bekerja sama dengan DAI Jember dalam sebuah inovasi "RDP Sagar" yang baru saja diluncurkan pada tahun 2025. Inovasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengangkutan sampah di titik titik TPA dengan mengolah sampah padat menjadi yang tidak memiliki nilai jual menjadi bahan bakar alternatif RDP ini dimanfaatkan oleh industri telah adanya adalah PT Dewa Indonesia, sebagai pengganti strategi tenaga kerja lokal dalam proses produksi semen.

## 2.2 Pemenuhan dan Isi Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

### 2.2.1 Pemenuhan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mewujudkan target untuk memenuhi Misi dan Mewujudkan sebagai Unitas Peningkat Daerah Kabupaten Jember di bidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember akan mengaktifkan jurnalis-jurnalis yang diangkat dari orang-orang yang diangkat. Peningkatan untuk bidang lingkungan hidup seperti capaian pertumbuhan



dan Gerakan (LSD) yang dilaksanakan yang mulai meluas di wilayah Kabupaten Jombang. Beberapa daerah rawan LSD adalah Kecamatan Kasemban, Kecamatan Dumahin, Kecamatan Jombang dan Kecamatan Dwidale. Pemantauan dan kontrol dan besarnya pengurasan tabu tidak kecil yang berkontribusi besar pada pencemaran air sungai di daerah sekitar. Pada cara ini, usaha tidak kecil memberikan manfaat ekonomi yang besar pada masyarakat, karena di sini lain dapat memperbaiki kualitas lingkungan. Jika hal ini tidak diwujudkan segera, dikawatirkan akan mendatangkan bencana ekologi dan sosial. Langkah upaya pengendalian kualitas air yang dilakukan pemerintah tidak akan ada artinya tanpa adanya partisipasi masyarakat. Salah satu langkah efektif pengendalian kualitas lingkungan adalah melalui penyediaan laboratorium lingkungan yang mampu memberikan pelayanan berkualitas dengan standar nasional.

Dititik Pengabdian Sampah dan Ruang Terbuka Hijau mengidentifikasi 3 (tiga) permasalahan utama, diantaranya terkait dengan RUPRAK tahun 12 Tahun 2025 tentang RUPRAK. Realisasi pembangunan penyediaan sampah mencapai 100% pada 2025, dan pada 2026 ditargetkan mencapai 50% sehingga pada tanggal 30/06/2024 target pengurangan sampah baru mencapai 24,77% dan target pengurangan sampah baru mencapai 29,24%, pasca pengabdian pelayanan; pengabdian sampah baru diharapkan di samping itu, tahun 2024 RUMAH TAMA WUKA (RUMAH TAMA) Kabupaten Jombang mengabdikan terdapatnya masalah yaitu 80% (tiga puluh persentas) dari sisi kapasitas parkir, mencapai 20% (dua puluh persentas) RUMAH TAMA dan 10% (sepuluh persentas) RUMAH TAMA, sementara saat ini (tahun 2024) RUMAH TAMA baru mencapai 118.766,88 m<sup>2</sup> (1,187 HA) sedangkan kapasitas penyediaan RUMAH TAMA adalah sebesar 2.288,88 HA.

Dengan demikian, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup harus berupaya lebih untuk mencapai target luas RTH sesuai Rencana Pola Ruang RTWU. Selain itu, pengalihan dan pemanfaatan sampah di TPA juga perlu ditingkatkan agar semakin membuat TPA lebih sepiang.

Meningkatkan pemanfaatan di Bidang Konservasi Lingkungan mengungkapakan adanya dua kendala tersebut di Kabupaten Jombang terutama terkait dan dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim, sehingga upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim harus dipacu. Terkini dengan sumber daya air, peningkatan populasi serta aktivitas manusia yang mengakibatkan sumber daya air mulai mengalami penurunan kuantitasnya merupakan ancaman serius terhadap kualitas, kuantitas dan keberlanjutan sumber daya air. Eksploitasi sumber daya alam berupa mineral hasil pertanian yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menimbulkan masalah-masalah kerusakan lahan di Kabupaten Jombang salah satunya kerusakan kerangka-geologi seperti juga perlu memperhatikan upaya perlindungan yang serius untuk mencegah kerusakan flora dan fauna endemik dan langka.

Pada bidang tata lingkungan pemerintahan sudah sudah potensi dan peran serta masyarakat dalam pencapaian lingkungan hidup dalam target dan terencana secara maksimal. Pada dasarnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan sudah cukup tinggi, namun belum semua tindakan upaya. Kondisi tersebut lingkungan yang bertumbuh dengan pihak swasta dan masyarakat pribadi lingkungan harus tetap dipelihara. Peningkatan lainnya adalah tingkat rendahnya kualitas perusahaan dalam mematuhi komitmen sebagaimana tertuang pada dokumen lingkungan. Sebagaimana strategi

Undang-undang Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengawasan yang dilaksanakan terdiri dari 2 macam yakni pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan pasif dilakukan dengan cara memajukan kepada setiap pemrakarsa usaha agar membuat laporan periodik pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, memonitor dan mengkritisi atas laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dituntut dan pemrakarsa. Pengawasan aktif dilaksanakan dengan cara melaksanakan kunjungan lapangan dan pengamatan langsung di lokasi tempat usaha atas kinerja perusahaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan pengawasan aktif terbatas terdapat beberapa perusahaan saja. Sedangkan pengawasan pasif didapatkan melalui Laporan periodik perusahaan. Laporan periodik yang diserahkan adalah sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan serta sebagai bentuk pengawasan Sistem lingkungan atas kinerja lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

Salah satu badan pemerintahan yang ada di Situbondong yang ada Dinas Lingkungan Hidup juga diberikan penugasan pemerintahan atas dokumen RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029.

Pemerintah pemerintahan berkaitan dengan tugas dan fungsi layanan di Situbondong Lingkungan Hidup dapat disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.12

**Femaran Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pelaksanaan Kerja**

No (I)	Masalah Pokok (II)	Masalah (V)	Akar Masalah (III)
1	Pemerataan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DD-TLA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemungkulan kemiskinan lokal</li> <li>- Pemerataan kualitas rumah dan air</li> <li>- Cagar budaya lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian tata ruang belum efektif</li> <li>- Akar fungsi lahan tidak terkendali</li> <li>- Lemahnya pemerataan &amp; pengalokasian sumber lingkungan</li> </ul>
2	Pengelolaan Sampah dan Limbah Baku Organik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Timbulan sampah tinggi dan tidak terasap</li> <li>- Limbah B3 endapan tidak terkubur</li> <li>- Sengketa dan air limbah rumah tangga tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan infrastruktur dan kualitas pengelolaan</li> <li>- Lemahnya kolaborasi dan koordinasi antarinstansi</li> <li>- Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat</li> </ul>
3	Pemerataan Kualitas Jasa Elektrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerataan ketersediaan air bersih</li> <li>- Pemerataan fungsi daerah resapan</li> <li>- Keterlambatan pembangunan jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi lahan kawasan alam</li> <li>- Pemeliharaan hutan dan daerah lindung</li> <li>- Minimnya program perlindungan dan konservasi</li> </ul>
4	Acuran Pemerataan Daya Dukung Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akar fungsi lahan pertanian</li> <li>- Pemerataan produktivitas pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak adanya perlindungan LPSB yang efektif</li> <li>- Penggunaan lahan pertanian yang tidak ramah lingkungan</li> <li>- Kurangnya sarana pertanian berkelanjutan</li> </ul>
5	Tingginya Risiko Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang, ketahanan, tingkat kemiskinan sangat</li> <li>- Meningkatnya keragaman spesies - iklim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemetaan ruang tidak memperhatikan kerentanan bencana</li> <li>- Rendahnya kapasitas adaptasi masyarakat</li> <li>- Belum terintegrasinya mitigasi iklim dalam rencana pembangunan</li> </ul>

No. (I)	Masalah Pokok (II)	Masalah (III)	Akhir Masalah (IV)
6	Masalahnya Kualitas Lingkungan Hidup (ULM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masalahnya Kualitas air, tanah, udara</li> <li>Meningkatnya risiko penyakit &amp; bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivitas industri tidak ramah lingkungan</li> <li>Lemahnya penegakan kualitas lingkungan</li> <li>Kemangrove serta area melindungi lingkungan sangat terbatas</li> </ul>

### 2.2.2 Telaah Kelembagaan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 telah menetapkan kerangka-kerangka strategi di kabupaten yang diprioritaskan pengembangannya berupa penyediaan pengaman sangat penting dalam tingkat kemampuan berdaya saing, serta, tujuan dan nilai lingkungan kawasan strategi kabupaten yang akan ditargetkan dalam dokumen RTRW 2021-2041 untuk upaya akan kawasan strategis dan nilai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup serta dari Kawasan Strategis Kabupaten yang akan LRA di Kecamatan Kramat, Kecamatan Kramat Jombang, Kecamatan Kramat Jombang, Kecamatan Kramat Jombang, dan Kecamatan Kramat. Sehingga menjadi sangat penting bagi nilai Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk memperhatikan Penguasaan LRA di kawasan tersebut.

Kerjasama pembangunan kelayakan RALHD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 diharapkan untuk bisa pada pengembangannya kerangka strategi agraris, khususnya di Kawasan Pertanian dan kawasan pendukung pengembangan kawasan GKS Pusi. Strategi pengembangan sistem pertanian yang mendukung wilayah Geringhaji/tersebut sebagaimana diuraikan dalam kerangka rencana ruang wilayah meliputi saat

terutama mendapatkan pemertahan keabsahan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh perseratus) RTH publik dan 10% (sepuluh perseratus) RTH privat. Dengan demikian, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan Pemertahan RTH Publik dengan Luas Idealnya 20% dan Luas kawasan perkotaan. Namun pada kenyataannya Luas RTH di wilayah Perkotaan hanya mencapai 10% sehingga masih menjadi PR besar bagi pemerintah Kabupaten Jombang untuk menyediakan RTH Publik.

Berdasarkan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Jombang, kriteria kawasan terdiri dari kawasan pertanahan ladang dan kawasan pertanahan budidaya. Kawasan pertanahan ladang meliputi semua upaya perlindungan konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mencegah kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dikahangkan menjadi kawasan budidaya. Kawasan konservasi yang dimaksud terdiri dari Taman H. Harto Soerjo yang memiliki luas 2.662,19 HaGMr di Kecamatan Wassidari.

Kawasan Strategis Nasional berada di wilayah Kabupaten dan Kawasan strategi Provinsi ditinjau dari tingkat kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri dari kawasan sekitar DAS Erasia. Sedangkan kawasan strategi Kabupaten ditinjau dari aspek kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri dari Kawasan Strategi Pergunungan Lintang 30 di Kecamatan Sumarta, Kecamatan Mactrodon, Kecamatan Dawa, Kecamatan Jombang dan Kecamatan Krahuh.

Secara pengertiannya pada kawasan Sungai Erasia adalah dengan melelektir penggunaan terhadap kawasan ini

melindungi tempat serta ruang di sekitarnya. Kawasan ini sebagai penyedia sumber daya air dan menyimpan berbagai kehidupan flora dan fauna tertentu dan juga memiliki fungsi pelayanan lingkungan hidup dengan berbagai fungsinya sebagai kawasan lindung. Kawasan Sungai Bantas di Kabupaten Jombang merupakan daerah aliran sungai kelas provinsi dan merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Tahapan Pengembangannya meliputi Konservasi Sumber Daya Air, Peningkatan SDA, dan Pengendalian Daya Runtuhan Air.

Pertemuan kawasan sempadan sungai bagi perlindungan DAS Bantas didasarkan berdasarkan Peraturan PU No. 60 Tahun 1990 serta seluasnya kurangnya 100 meter di kiri kanan yang berada di luar pemukiman. Kriteria pemukiman sempadan sungai Bantas berdasarkan PP No 28 Tahun 2000 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi:

- Garis sempadan tepan sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari tepi tanggul sebelah luar.
- Garis sempadan tepan sungai lebar lima bertanggung di luar kawasan pemukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai dan

Sementara itu, Temba Bantas Raya adalah kawasan pertanian untuk tujuan pemukiman alami atau wisata. Kriteria kawasan berupa tanggapan tanggapan dengan fungsi lindung nilai vegetasi tetap dengan tanggapan flora dan fauna, twining alam dan air yang telah untuk pemukiman kriteria pemukiman kawasan tepan Bantas Raya menurut PP No 28 Tahun 2000 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional:

KAWASAN TAMBAN M. Bantas yang terdapat di Kabupaten Jombang merupakan kawasan strategis provinsi (KSP) yang memiliki nilai 2.844,7 HA atau 4840M 10,07% dari nilai total

Hutan Raya di Jawa Timur yang memiliki luas 27.845,93 Ha. Dengan potensi wisata yang colour beraneka seperti flora dan fauna serta pemandangan alam yang indah. Beberapa kegiatan wisata alam yang dapat dilakukan diantaranya : hiking alam, menikmati pemandangan alam pegunungan, berkebun, mandi air panas dan lain-lain. Kawasan Talvira R. Duryo dapat digunakan juga sebagai kawasan wisata seperti camping, petualang, wisata pengamatan burung dan lain-lain, juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan penelitian flora dan fauna. Keberadaan hutan pada kawasan ini harus tetap terjaga, dilindungi penguasaan oleh fungsi kemati untuk fungsi habitat itu sendiri.

Arahan pengelolaan Taman Hutan Raya R.Duryo antara lain:

1. Mengembalikan fungsi habitat terutama pada kawasan dengan cakupan 40% dan menetapkan peraturan daerah tentang lindungan masyarakat beragama pada kawasan konservasi, serta
2. Program pengabdian keistimewaan :
  - a. Program pengabdian hutan beraneka hayatiologi dengan tujuan memberikan pemahaman tentang perlinggihan hutan alam mengabdikan fungsi ekologi juga secara tidak langsung memiliki nilai ekonomis
  - b. Mempertahankan wilayah dengan melakukan pemertanian pohon produktif yang dapat di gunakan sebagai perlinggihan ekowisata alamiah berkeaja
  - c. Membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk mempromosikan area wisata wisata alam.

Kontribusi keaja lianglapan hidup strategi (KALH) adalah untuk memastikan bahwa prinsip perlinggihan berkeaja lian akan menjadi dasar dan terintegrasi dalam perlinggihan suatu wilayah (KALH, 2014; KALH, 2015; KALH, 2016).

atau program. Terutama terhadap KLHS merupakan bentuk pelaksanaan agar dalam penyusunan Rencana Desa Lingkungan Hidup tidak terlepas dengan hasil kajian yang termasuk dalam KLHS. Hal tersebut tidak terlepas dengan tujuan dari disusunnya KLHS, yaitu:

1. Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berwawasan telah dipertimbangkan dalam rencana RTRW Kabupaten Jombang
2. Meningkatkan kualitas RTRW sebagai upaya meminimalkan potensi pengaruh negatif dan/atau risiko pelaksanaannya terhadap kondisi lingkungan hidup.

Sasaran dari penyusunan KLHS Kabupaten Jombang adalah terciptanya kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi dan kemampuan lingkungan, sebagai fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat akibat degradasi lingkungan dapat dihindarkan. Hal terkait lingkungan hidup yang diamanatkan KLHS antara sebagai berikut:

1. Rencana struktur ruang meliputi:
  - a. Rencana sistem jaringan pemukiman sumber daya air
    - Rencana pengembangan wilayah sungai untuk tata air baku pemukiman, diantaranya Sungai Brantas, Sungai Koro Kadi, Sungai Gending, Sungai Metyono, Sungai Jombang Utara dan Sungai Jombang Kota.
    - Rencana pengembangan wilayah tata air, diantaranya Sistem Paksi, Sistem Uluhan, Sistem Sura di Kecamatan Boreg, Sumber Jarak, Sumber Timal dan Sumber Deger di Kecamatan Kromolan; Wilayah Kali di Kecamatan Ngali; Wilayah Kali di Kecamatan Kudu.
    - Rencana pengembangan wilayah, diantaranya Wilayah Kaperajo, Keting Tinggi, Keting Tinggi II

Kecamatan Kudu; Embung Palabuhan, Embung Grubogan dan Embung Sragiri di Kecamatan Pleredon, Waduk Brumbung, Waduk Karangpaku dan Embung Wadung di Kecamatan Kebuh.

- Rencana Pengembangan Waduk sebagai sumber daya air strategis provinsi, yaitu waduk Wang di Pleredon dan Waduk Jorok di Wirucalen.
- Rencana pengembangan sistem pengalihan air baku, yaitu Desa Sumber Dondang (Kecamatan Kebuh), Desa Grubogan (Kecamatan Mojongari) dan Desa Gedongombo (Kecamatan Ploso)

#### b. Rencana Sistem Jaringan Pemukiman Lingsarungu

Sebagai salah satu upaya pemukiman lengkap di wilayah perkotaan, dilaksanakan TPA seluas 34 hektar di Desa Banjarbaru Kecamatan Jombang. Rencana Pengembangan TPA dilaksanakan hanya merupakan land use dalam mata air dan badan air lainnya yang dipakai penduduk untuk kehidupan sehari-hari. hanya lokasi yg mata air hanya penyebaran penyakit melalui binatang vektor, misalnya lalat. Untuk menghindari penyebaran land use body air tanah perlu dilakukan : 1) Penilaian sumber yang dilaksanakan pada sumber sumber; 2) Memanfaatkan sistem SW; 3) Pengalihan sumber menjadi sumber energi baru; 4) Peningkatan sumber energi baru dengan air tanah; 5) Peningkatan jalan sebagai tanggul air membuat jalan barrier yang memadai dengan menggunakan teknologi hidup dengan jenis pohon yang tumbuh dan cepat tumbuh seperti pohon anggur; 6) Pertanian secara makro.

#### c. Rencana Pengelolaan Air Limbah

Rencana pengumpulan bahan bahan berahaya dan Beracun (LEO) yang dikembangkan menimbulkan dampak terhadap lingkungan dimana bahan pencemar yang dihasilkan oleh industri seperti masuk ke dalam tanah dapat mencemari air tanah (sumur dan mata air), juga menimbulkan bau dan debu yang beracun. Penyempitan lahan ES yang sebagian besar langsung kontak dengan tanah juga memberikan dampak lingkungan pencemaran tanah. Hal ini akan mempengaruhi kandungan logam pada tanah yang juga berpengaruh pada makhluk hidup. Rencana pengumpulan LEO di Desa Sedogadirejo (Des. Dumobro), Desa Sulanejo Kecamatan Dureh, Desa Bayardiro (Kecamatan Jombang dan Desa Kertajanggung Kecamatan Bantarkecamatan).

## 2. Rencana pola ruang, meliputi:

### a. Rencana Kawasan Lindung

- Rencana Kawasan Males Lindung seluas 870,04 Ha di Kecamatan Widasari
- Rencana Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kesuburan berahayanya (kawasan seluas air seluas 745 Ha di DAS Brantas dan Cekungan Air Tanah di SMPH Dologon (Kecamatan Widasari)
- Rencana Kawasan pertanahan sempai:
  - Rencana kawasan pertanahan sempai sempai seluas 822,95 Ha
  - Rencana kawasan pertanahan sempai sempai seluas 22,06 Ha
  - Rencana kawasan pertanahan sempai seluas mata air seluas 179 Ha

- Rencana Kewajiban penastanganan sempadan sempadan sungai
- Rencana Ruang Terbuka Hijau
  - Rencana RTH Dekamangan meliputi RTH Jarak dengan proporsi penastanganan 10% dan luas perki
  - Rencana RTH Taman dan Hutan Kota meliputi RTH Publik dengan proporsi 20% dan luas penastanganan sekurang-kurangnya 2.500,00 Ha
  - Rencana RTH Jalur Hijau dan median jalan meliputi jalur hijau
  - Rencana RTH Bangsi tertantu meliputi RTH di sempadan sungai, mata air, embok, embung, SUTT, dan kawasan api, pipit gas dan penastanganan
- Rencana Kewajiban Pelaksanaan Amdam dan Cagar Budaya
  - Rencana Kewajiban Taman Hutan Raya R. Soeryo (luas 2.576,13 Ha di Kecamatan Worowotan)
  - Rencana Kewajiban Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Lingkungan Berupa Mon Dukung, yaitu Nila, Mahak dan Pindasi yang ada di Kabupaten Jombang
  - Rencana Kewajiban Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Lingkungan Berupa Gedung, yaitu Masjid Jami' built bersejarah, Kertang Muz dan Bangg, Daerah Perikanan OKLW Mojowarno
- Rencana Kewajiban Rangka Banteng
  - Kewajiban rangka banteng gawig salaku jastan sempadan sungai
  - Kewajiban Rangka Tanah Lajang salaku 18.000,00 Ha
  - Kewajiban Rangka Rukun Kagapan salaku turuip Lajang salaku
  - Kewajiban Rangka Banteng salaku 1.888,72 Ha

- Kawasan Bahaya Angin Puting Belulang yang merupakan wilayah yang pernah terkena bahaya angin puting belulang
- Kawasan Rawan Bencana Hidrologi

#### b. Rencana Kawasan Dukung

- Rencana Kawasan Pertambangan
  - Kawasan Pertambangan Mineral Dalam Lokasi berupa pertambangan yodium di Kecamatan Kembaran
  - Kawasan Pertambangan Bahan Minyak dan Gas Alam di Blok Gunung
  - Pertambangan Galena C di Kecamatan Pindana, Ploso, Kudu, Kebuh, Kembaran, Perak, Sendangsawangan, Ngoro dan Darwig
- Rencana pertumbuhan kawasan industri selama 2025-2029 meliputi industri besar, industri sedang dan industri kecil
- Peningkatan Industri Sdag Aluminium (Limbah B3) di Kecamatan Kembaran dan Pundaha Untuk mendukung sejuta motor pertumbuhan air bersih untuk perlu motor pertumbuhan air bersih dari desa tingkat Pondsok-Jedong, memelihara dan meningkatkan pertumbuhan untuk membantu pertumbuhan sumber daya alam, mengabdikan studi untuk sejuta motor pertumbuhan yang terkandung pada tanah pertanian/pertanian mengabdikan well artikel hidup lingkungan dengan studi yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) tingkat motor pertumbuhan kesehatan masyarakat, mendukung pertumbuhan lingkungan, industri kecil (IK) dengan motor pertumbuhan industri dan yang dapat mendukung pertumbuhan dalam kawasan secara terpadu, maksimal dan pertumbuhan dan pertumbuhan/pertumbuhan baru kegiatan

tejara, memastikan pengelolaan lingkungan yang dilakukan industri dan ulang yang ekonomis khususnya terhadap kualitas udara dan limbah B3 untuk memastikan pengelolaan lingkungan tersebut sesuai persyaratan peraturan lingkungan terkait area dokumen UPL-UPL yang telah ditetapkan.

#### 5. Rencana kegiatan strategis meliputi:

- a. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah dan Dapur Negeri/Negara Pagar dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
  - Sepanjang Aliran Sungai Demati
  - Sepanjang Aliran Sungai dan Kanal/Arour yang tersebar di wilayah Kabupaten Jember
  - Kawasan Taman Hutan Raya R. Soejito di Kecamatan Wonorejo

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil analisis dan identifikasi permasalahan pelayanan DLM Kab. Jember berdasarkan RTW dan ELHS.

Tabel 2.13

Hasil analisis dan identifikasi permasalahan pelayanan DLM Kabupaten Jember berdasarkan RTW dan ELHS Kabupaten Jember

RTW terkait tags dan fungsi DLM	ELHS terkait tags dan fungsi DLM	Permasalahan Pelayanan DLM Kab. Jember	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Keuangan termasuk bidang kesehatan termasuk ak. kesehatan umum kesehatan, pelayanan kesehatan umum (Pasal 43-47)	Isa strategi kesehatan kesehatan umum bidang	Layanan kesehatan umum pelayanan kesehatan umum & umum	Lemahnya penguasaan terhadap ak. fungsi lintas koordinasi antar-CPD belum optimal	Isa dukungan RTW dan ELHS untuk kesehatan untuk kesehatan umum kesehatan umum

RKPD terkait tugas dan fungsi DJH	KLMD terkait tugas dan fungsi DJH	Pemecalahan Pelayanan DJH Kab. Jombang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pengembangan pemeliharaan ruang pemertahanan daya, saluran dan daya tenaga listrik (Pusat 40-02)	Ini strategi Peningkatan kapasitas pengurusan air	Berang waktu lama / adanya keabsahan DAK dan ada target lain	Demografi yang belum tersedia: koordinasi antar-CPD lemah	Terjadi inovasi daya saluran dan daya tenaga listrik KLM
Pengembangan Ruang Terkini Nomenklatur 2016 melalui perbaikan (Pusat 54)	Indikator DJH peningkatan layanan pelanggan pemeliharaan	Cakupan KPI publik masih rendah	Lokasi terbatas, kurangnya pemetaan penggunaan lahan	Dibangun lapangan KIPV dan keabsahan standarisasi melalui perbaikan
Pemangsaan, limbah ST dan limbah domestik agar tidak mencemari air tanah dan sungai (Pusat 62)	Ini strategi Peningkatan pengelolaan pencemaran dan pengendalian pencemaran	Kualitas TSP dan pengelolaan sampah tidak optimal, pemantauan air sungai	Terdapatnya armada, TCM, dan infrastruktur pengolahan: kualitas keabsahan monitoring	Dibangun KLM strategi ini melalui: pelung kontrolisasi sesuai dan hasil sampah
Pemangsaan limbah perikanan: limbah lautan pemertahanan pengendalian pencemaran (Pusat 00-01)	Ini strategi Peningkatan kualitas air sungai	Lebih banyak belum dikelola: tidak, pemertahanan kualitas air sungai	Lemahnya pemertahanan limbah dan pengurusan: pemertahanan limbah: limbah	Dibangun regulasi lapangan dan mangrove: pemertahanan keabsahan limbah

### 1.1.3 IJU STRATEGIS

Ini strategi merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang atau tantangan suatu daerah di masa datang. Ini strategi lebih berorientasi pada masa depan. Ini strategi juga dapat diartikan sebagai potensi yang daerah yang belum terakuisisi, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dalam pembangunan daerah, ini strategi dapat berasal dari permasalahan-permasalahan (isu) internal pembangunan daerah maupun isu eksternal. Ini internal permasalahan pembangunan

yang telah terserifikasi sebelumnya merupakan isu dari hasil evaluasi kinerja atau Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Jombang pada periode sebelumnya (2019-2024). Dengan demikian, isu strategi dalam kategori ini dirumuskan dari permasalahan (masalah) kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, geografis dan kebudayaan, sumberdaya perwilayahan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, kelompok isu strategi kedua adalah isu yang berasal dari luar atau eksternal Kabupaten Jombang, baik yang berupa isu internasional, nasional, maupun berupa kebijakan pemerintah pusat. Isu eksternal yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan/kegagalan pembangunan Kabupaten Jombang di masa mendatang, baik positif (dikawatirkan sebagai peluang maupun negatif (dikawatirkan sebagai ancaman), dapat dikategorikan sebagai isu strategi. Peluang bisa menjadi isu strategi karena kondisi tersebut dapat dimanfaatkan dan dimanfaatkan baik sebagai penguatan. Korupsi Jombang. Sementara itu, tantangan yang bisa menjadi isu strategi yang menjadi penghalang keberhasilan pembangunan jika tidak diantisipasi dan/dita atur/ditangani. Isu strategi Kabupaten Jombang juga dibangun berdasarkan arahan dari dokumen perencanaan esian - seperti RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2029 strategi pengabdian RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029 yang sudah tersedia. RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029. dan laporan kajian lingkungan hidup strategi yang sudah tersedia - meliputi agenda/isu-isu global/internasional.

Tidak terlepas itu-itu intervensi (govern) menghasilkan itu-itu tingkat govern yang harus dipertanggungjawabkan penyusunan kebijakan Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun

2025-2029 yang berkaitan dengan lingkungan hidup diantaranya adalah :

#### A. Isu Strategis Global/Internasional

##### 1. Isu Sustainable Development Goals

Kerusakan lingkungan hidup secara global telah berdampak pada perubahan iklim yang memuat berbagai bencana yang mengancam keberlangsungan hidup manusia di masa mendatang. Puncaknya seperti-cara di dunia yang terdampak dalam Perjanjian Esang-bangsa (PBB) telah berkomitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau disingkat 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2030. Sebelumnya hingga tahun 2030, hal ini masih akan menjadi isu global. Seluruh komponen negara, tidak terkecuali seluruh pemerintah daerah di Indonesia harus berkontribusi dalam pencapaian SDGs di daerahnya masing-masing.

Terikat isu ini, pembangunan di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, harus mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam tujuan pemerintahnya. Hal inilah yang menjadi semangat mencapai *net zero*. Secara berkala, capaian tujuan pembangunan berkelanjutan di evaluasi untuk selanjutnya menjadi rekomendasi rencana pembangunan selanjutnya. Dalam penyusunan RPJMD yang ditahabai dengan Rencana Taktis/Strategis RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 ini seperti-cara pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemitraan yang menjadi kewenangan kabupaten menjadi isu strategis yang harus dipertahankan melalui berbagai program pembangunan di masa mendatang.

##### 2. Perubahan iklim transisi dan ketahanan strategisnya

Ini tentang pembangunan di dunia yang harus memperhatikan lingkungan sebenarnya telah ada sejak tahun 1992 melalui Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Pematangaran Bangsa-Bangsa pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro dan diperkuat dengan tanggal 21 Maret 1994. Perubahan iklim dan dampak negatifnya yang terus berlanjut menuntut adanya konvensi atau perjanjian internasional antar Negara-negara di dunia untuk bersama-sama melakukan upaya penurunan tingkat penyebab pemanasan global melalui perubahan iklim. Bumi gas rumah kaca dan berbagai aktivitas manusia dianggap sebagai penyebab rusaknya lapisan ozon bumi yang berpengaruh pada pemanasan global. Karenanya, tuntutan untuk melakukan sesuatu nilai penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi kewajiban negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Tidak hanya itu, dampak perubahan iklim telah menyebabkan bentuk bencana alam yang bervariasi dengan intensitas yang semakin tinggi dan beragam. Berbagai upaya untuk mitigasi maupun penanganan bencana menjadi tantangan global pada era perubahan iklim dunia ini harus menjadi perhatian khusus di Kabupaten Jombang terutama bagi penyelenggara urusan lingkungan hidup, penyediaan infrastruktur yang masih sederhana, serta penanganan dan mitigasi bencana alam.

#### **R. 100 Strategi Nasional: Telah berkecukupan sebagai RPJMN tahun 2025-2045**

Kondisi eksternal lain yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan Kabupaten Jombang di masa mendatang adalah ancaman ledakan-ledakan nasional yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah. Kebijakan nasional tersebut harus dibelaah untuk selanjutnya menjadi pembangunan dipertanama.

serta menyusun isi strategi, tujuan, sasaran hingga program/kegiatan pembangunan ke depan.

Isi strategi nasional yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Jombang umumnya berupa kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2009 tentang RPJMN Tahun 2009-2014. Dalam dokumen tersebut, dijelaskan hasil evaluasi pembangunan nasional dan analisis kondisi eksternal/isu global dalam lima tahun terakhir sebagai dasar/latihan tantangan pembangunan Nasional tahun 2009-2014. Tantangan pembangunan nasional tersebut menjadi isi strategi nasional yang harus dijabar melalui RPJMN pada periode tersebut. Isu-isu strategi pembangunan nasional yang terkait dengan lingkungan hidup adalah Krisis Lingkungan, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan mengancam masa depan bumi dan manusia. Krisis ini berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang, serta tantangan untuk terlibat ke aktivitas ekonomi yang rendah nilai gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kehutanan dan pelestarian, pangan dan pertanian, serta limbah dan penanganan ekonomi sirkular. Untuk itu, diperlukan upaya pemertahanan sumber daya lingkungan sebagai hal yang perlu diperhatikan.

#### C. Telah terkehadapan dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 pada Tahap Pertama (2025-2029).

Dokumen ini Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya menjadi salah satu penyusunan RPJPD Kabupaten Jombang dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang menguraikan visi, misi dan program prioritas pembangunan dan Wakil Gubernur Jawa Timur masa 2025-2029. Isi strategi, visi, dan

sem: RPJMD Kabupaten Jombang harus selaras dengan visi, strategi, misi dan nilai dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Arah kebijakan maupun program prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 pun harus selaras, sinergi, dan didukung oleh arah kebijakan maupun program prioritas pembangunan Kabupaten Jombang.

Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Timur telah mengidentifikasi isu-isu strategi pembangunan pada periode 2025-2029, yaitu: "Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengamalkan prinsip pembangunan berkelanjutan."

**Table 1**  
**PERCENTAGE OF POPULATION UNDER 18 YEARS OF AGE, 1990-2000**  
**PERCENTAGE OF POPULATION UNDER 18 YEARS OF AGE, 1990-2000**

STATE	1990	1995	2000		
			Male	Female	Total
Alabama	20.1	19.8	19.5	19.8	19.7
Alaska	18.5	18.2	17.8	18.0	17.9
Arizona	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Arkansas	20.5	20.2	19.8	20.0	19.9
California	19.0	18.7	18.3	18.5	18.4
Colorado	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Connecticut	18.5	18.2	17.8	18.0	17.9
Delaware	18.5	18.2	17.8	18.0	17.9
District of Columbia	18.5	18.2	17.8	18.0	17.9
Florida	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Georgia	20.5	20.2	19.8	20.0	19.9
Hawaii	18.5	18.2	17.8	18.0	17.9
Idaho	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Illinois	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Indiana	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Iowa	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Kansas	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Kentucky	20.5	20.2	19.8	20.0	19.9
Louisiana	20.5	20.2	19.8	20.0	19.9
Maine	18.5	18.2	17.8	18.0	17.9
Maryland	18.5	18.2	17.8	18.0	17.9
Massachusetts	18.5	18.2	17.8	18.0	17.9
Michigan	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Minnesota	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Mississippi	20.5	20.2	19.8	20.0	19.9
Missouri	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Montana	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Nebraska	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Nevada	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
New Hampshire	18.5	18.2	17.8	18.0	17.9
New Jersey	18.5	18.2	17.8	18.0	17.9
New Mexico	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
New York	18.5	18.2	17.8	18.0	17.9
North Carolina	20.5	20.2	19.8	20.0	19.9
North Dakota	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Ohio	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Oklahoma	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Oregon	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Pennsylvania	18.5	18.2	17.8	18.0	17.9
Rhode Island	18.5	18.2	17.8	18.0	17.9
South Carolina	20.5	20.2	19.8	20.0	19.9
South Dakota	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Tennessee	20.5	20.2	19.8	20.0	19.9
Texas	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Utah	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Vermont	18.5	18.2	17.8	18.0	17.9
Virginia	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Washington	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
West Virginia	20.5	20.2	19.8	20.0	19.9
Wisconsin	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9
Wyoming	19.5	19.2	18.8	19.0	18.9

INTERNAL SECURITY UNIT (ISU) - 2010

<b>INTERNAL SECURITY UNIT (ISU) - 2010</b> (a) Name of the person (b) Date of birth (c) Nationality (d) Sex (e) Marital status (f) Religion (g) Education (h) Occupation (i) Address (j) Contact details (k) Other relevant information	<b>INTERNAL SECURITY UNIT (ISU) - 2010</b> (a) Name of the person (b) Date of birth (c) Nationality (d) Sex (e) Marital status (f) Religion (g) Education (h) Occupation (i) Address (j) Contact details (k) Other relevant information	<b>INTERNAL SECURITY UNIT (ISU) - 2010</b> (a) Name of the person (b) Date of birth (c) Nationality (d) Sex (e) Marital status (f) Religion (g) Education (h) Occupation (i) Address (j) Contact details (k) Other relevant information				<b>INTERNAL SECURITY UNIT (ISU) - 2010</b> (a) Name of the person (b) Date of birth (c) Nationality (d) Sex (e) Marital status (f) Religion (g) Education (h) Occupation (i) Address (j) Contact details (k) Other relevant information
		(a) Name of the person (b) Date of birth (c) Nationality (d) Sex (e) Marital status (f) Religion (g) Education (h) Occupation (i) Address (j) Contact details (k) Other relevant information	(a) Name of the person (b) Date of birth (c) Nationality (d) Sex (e) Marital status (f) Religion (g) Education (h) Occupation (i) Address (j) Contact details (k) Other relevant information	(a) Name of the person (b) Date of birth (c) Nationality (d) Sex (e) Marital status (f) Religion (g) Education (h) Occupation (i) Address (j) Contact details (k) Other relevant information	(a) Name of the person (b) Date of birth (c) Nationality (d) Sex (e) Marital status (f) Religion (g) Education (h) Occupation (i) Address (j) Contact details (k) Other relevant information	

Degradasi lingkungan bergerak pesat sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk. Peningkatan penduduk berimplikasi pada tingginya tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup serta tuntutan pembangunan untuk pemukiman, fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya. Dampak kerusakannya adalah semakin berbarangnya lahan rusak terbelah-belah, semakin meluasnya pembukaan lahan baru untuk kepentingan produksi, eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan, dan pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Pemanasan global mempercepat kondisi lingkungan yang buruk, sehingga menimbulkan bencana alam di berbagai daerah.

Degradasi pula yang terjadi di Kabupaten Jombang, cukup banyak aspek yang ikut mempengaruhi kualitas lingkungan baik lokal maupun global. Setelah melalui tahap identifikasi permasalahan, telah terbentuk visi, misi dan program kepala daerah, telah pusat KLHK dan DGH Provinsi Jawa Timur, serta telah terbentuk RTW dan KLMD Kabupaten Jombang, sehingga isu strategi ini dipaparkan melalui Forum Peringatan Daerah yang mengaitkan stakeholder Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, sebagai lembaga yang lebih dikenal terkait kemudian menggunakan rumusan isu strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. **Perubahan Kualitas, Kuantitas dan Komposisi Sumber Daya Air Darat dan Keanekaragaman Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman hayati kualitas air sungai di Pesisir Jawa dan Sumatera terus mengalami penurunan.** Kontribusi penurunan kualitas air terhadap lokasi 80-90% berasal dari limbah domestik, pertanian (ta), air hujan asam serta aktivitas sumber daya alam (sustainable) alam kritis yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan tanah untuk



kelestarian tanah, dan daya dukung lahan serta keberlanjutan hayati. Selain itu, aktivitas penambangan mineral yang harus mengikhtisarkan kerangka kualitas tanah, terjadinya kecelakaan/kecelakaan akibat lokasi tambang yang berdekang, besar dan lain sebagainya. Selain itu, banyak terdapat air hangat lahan dari Lahan Hijau menjadi Perumahan/Perumahan/Kawasan Industri sehingga terjadi penurunan Jumlah Tutupan Vegetasi. Selain itu, telah ada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTK) Kabupaten Jombang mengharuskan terdapatnya minimal lahan 30% (tiga puluh perseratus) dan luas kawasan perikanan, meliputi 30% (dua puluh perseratus) RTR Publik dan 10% (sepuluh perseratus) RTR Privat, sementara saat ini (tahun 2024) RTR Publik baru meliputi 116.790,00 m<sup>2</sup> (11,87 Ha) sedangkan kewajiban persentase RTR Publik adalah sebesar 2.229,00 Ha.

#### 4. Efektifnya pelaksanaan konsep LRS di Kabupaten Jombang

Sebagai upaya pengendalian pemanfaatan lahan terkhusus di lahan berair (LRS), pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang melaksanakan penyusunan AMDAL Lingkungan Bakuair Kaki [LRS] Daerah yang akan diklasifikasi di kawasan permukiman dan kawasan lain tahun berjalan yaitu AMDAL Bakuair Kaki, sebagai salah satu instrumen kebijakan hukum yang harus diwujudkan pemerintah. Timbanya hutan dan pertanian yang terancam di daerah tersebut yang adanya pemukiman sekitar mengakibatkan lingkungan terancam dan jika dibiarkan dapat berdampak buruk pada kesehatan. Pemerintah lagi harus pemerintah LRS tidak hanya di daerah-daerah lain seperti di Kabupaten Jombang

dan Kecamatan Depok. Sebagai langkah perlu dibuat peraturan daerah dalam hal pemberian palaku usaha yang menghasilkan residu atau menggunakan LDD sebagai bahan baku. Instrumen hukum juga perlu diperbaiki dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya harus dicantumkan solusi atas permasalahan yang timbul pasca pemberian usaha yang dilakukan.

## BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAS KEBIJAKAN

## 3.1 Tujuan Nerevisi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Agar terwujud kualitas pelayanan prima dengan rangka melaksanakan misi untuk percepatan via Kompetensi Jombang, dimulainya tujuan, strategi dan indikator sasaran yang dilaksanakan dengan tinggi jujur, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup serta dengan pola strategi penguasaan Search Kompetensi Jombang sebagaimana Mewujudkan Penguasaan Daerah (PAMUD) Kompetensi Jombang Tahun 2016-2019. Tujuan adalah pernyataan dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam waktu waktu 4 tahun. Adanya tujuan ini memberikan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Tujuan Nerevisi Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 adalah:

**"Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan"**

Tujuan ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) dan
2. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).

## 3.2 Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Sasaran adalah pernyataan dari tujuan, dan merupakan titik tolak yang akan dicapai atau dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu bulanan, triwulan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang

stabilisasi Deras Lingkungan Hidup secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator
  - Indeks Kualitas Air (IKA)
  - Indeks Kualitas Udara (IKU)
  - Indeks Kualitas Lahan (IKL)
2. Meningkatkan layanan pengelolaan sampah dengan indikator
  - Tuntutan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
3. Tersedianya Tata Kelola Bioteknologi yang bersih dan Efektif dengan indikator
  - Indeks Kebersihan Bioteknologi Pertanian Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah oleh Dinas Lingkungan Hidup serta indikator kerjanya disajikan dalam tabel di bawah ini :

Table 1: Financial statements (audited) (in million SEK)

Item	2019	2018	2017	2016					
				Q1	Q2	Q3	Q4	Annual	
Revenue	1,000	950	900	220	230	240	250	940	
Cost of sales	(400)	(380)	(360)	(90)	(95)	(100)	(105)	(370)	
Gross profit	600	570	540	130	135	140	145	570	
Operating expenses	(200)	(190)	(180)	(45)	(48)	(50)	(52)	(195)	
Operating profit	400	380	360	85	87	90	93	375	
Other income	10	15	20	5	5	5	5	20	
Profit before tax	410	395	380	90	92	95	98	395	
Tax expense	(100)	(95)	(90)	(25)	(25)	(25)	(25)	(95)	
Profit after tax	310	300	290	65	67	70	73	300	
Net income	310	300	290	65	67	70	73	300	

### 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Aksi Kebijakan adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi/ lembaga untuk melaksanakan pemenuhan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Tabel 3.2

Strategi dan Aksi Kebijakan RPJMD 2025-2029 berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Jombang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	AKSI KEBIJAKAN
<b>MISI 2: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang modern dan berkualitas.</b>			
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang modern dan berkualitas	1. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Mengadakan upaya pengoptimalan serta pemeliharaan kawasan lingkungan hidup dan pemertanian, urban, dan rural - termasuk di dalamnya pengalihan pertanahan & pemertanian pertanian.	Pengaktifan sumber pemertanian lingkungan dan pertanahan & pemertanian bertani dengan melibatkan seluruh masyarakat.
		Mengadakan pengalihan pemertanian lahan.	Implementasi rencana yang dapat melibatkan pemertanian pemertanian lahan.

#### Program Prioritas Bupati Jombang .

Sebagai yang telah dijelaskan pada Sub Bab 3.2.3 Tindakan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam rangka Misi lingkungan Hidup Kabupaten Jombang mengaitkan program prioritas Bupati Jombang yang tertuang dalam Strategi Meningkatkan pengalihan

keanekaragaman hayati dengan Gerakan Terbangannya Ruang Terbuka Hijau dengan fasilitas publik lengkap untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan interaksi sosial masyarakat dengan Paga Indeksatif sebesar 10 Milyar dengan target terbangunnya 8 unit RTU selama 5 tahun hingga akhir tahun 2029. Selain penerapannya RTU, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember juga menerapkan strategi Meningkatkan upaya mitigasi/pencegahan serta penyelesaian masalah lingkungan hidup dari pencemaran air, udara, dan tanah termasuk di dalamnya pengendalian pencemaran di Kecamatan perbatasan sehingga pada tahapan 5 (lima) tahun yang akan datang tertera dalam tabel berikut :

Tabel 3.3  
Peningkatan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Jember Tahun 2026-2030

TAHAP I (Tahun 2026)	TAHAP II (Tahun 2027)	TAHAP III (Tahun 2028)	TAHAP IV (Tahun 2029)	TAHAP V (Tahun 2030)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan mekanisme pelaksanaan sistem lingkungan</li> <li>• Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan sistem informasi lingkungan hidup</li> <li>• Peningkatan IKM</li> <li>• Peningkatan kapasitas pengabdian lingkungan hidup dan pengabdian kehumasan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langkah penguatan pelaksanaan sistem lingkungan</li> <li>• Langkah peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan sistem informasi</li> <li>• Peningkatan IKM</li> <li>• Fasilitas pusat 2 unit RTU publik</li> <li>• Peningkatan kapasitas pengabdian lingkungan hidup dan pengabdian kehumasan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan pelaksanaan dan pengamatan sistem lingkungan</li> <li>• Integrasi sistem informasi lingkungan hidup secara digital</li> <li>• Pemantauan dan publikasi IKM</li> <li>• Pembangunan tambahan RTU publik</li> <li>• Kegiatan pengabdian kehumasan lingkungan ke luar kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi penguatan fasilitas lingkungan sesuai kapasitas</li> <li>• Evaluasi kinerja IKM dan kinerja layanan lingkungan</li> <li>• Pembangunan 4 RTU publik tahap akhir jember 2 unit</li> <li>• Peningkatan kapasitas IKM dan kehumasan lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi hasil pembangunan lingkungan hidup lima tahun</li> <li>• Penerimaan target hasil pembangunan 4 unit RTU publik</li> <li>• Peningkatan kinerja secara menyeluruh mencapai Rencana Tahun 2020-2024</li> <li>• Penguatan keberlanjutan program pemantauan kualitas lingkungan dan IKM</li> </ul>

Sumber : Data Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya untuk mencapai Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan dengan sasaran :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

a. Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup melalui: (i) Penguatan mekanisme pelaksanaan dokumen lingkungan (ii) Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan sistem informasi lingkungan hidup; (iii) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (iv) penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (v) Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan; dan (vi) Penyusunan rencana sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang bermitra lintas sektor.

b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui: (i) pengembangan pemantauan nilai/ mutu ke tatanan air dan sumberdaya air; (ii) penetapan kelas air; (iii) pengembangan pemantauan status dari sektor industri; (iv) peningkatan upaya pemertanian, kehutanan, kehutanan kota; (v) pemertanian kualitas udara ambient; (vi) pengujian upaya sanitasi; (vii) peningkatan tutupan vegetasi; (viii) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup (ix) Pemeliharaan dan pemertanian sumber air dan kualitasnya (x) melibatkan dan meningkatkan kualitas kewilayahan heryal dan pemertanian jasa lingkungan.

2. Meningkatkan layanan pengelolaan sampah

a. Meningkatkan Nomor Standar Prosedur dan Kerja (NSP) upaya pengurangan sampah melalui peningkatan layanan

- a. Penguatan kapasitas dan kolektivitas perguruan tinggi
  - b. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui kolaborasi, inisiatif, dan advokasi
  - c. Penguatan komitmen bagi dunia usaha melalui penerapan kerangka prosedur dalam unit mahasiswa upaya pengurangan sampah
3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pemangku Daerah
- a. Menyusun perencanaan bidang lingkungan, serta pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja
  - b. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan
  - c. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan

#### 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana PD Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Pengelolaan sumber perikanan lingkungan dan perikanan di kawasan berbasis risiko dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat dilakukan dengan peningkatan kolaborasi antar Pemangku Daerah, Stakeholder dan Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Perikanan dan Penguasaan Wilayah

Tabel 3.4

Arah Kebijakan RPJMD dan Rencana Pemangku Daerah

No	Operasionalisasi RPPE	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rencana PD	San.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perikanan Daerah yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPPLD Kabupaten / Kota</li> <li>2. ELSD untuk LSP Kabupaten, Kota.</li> </ol>	<p>1. Penguatan sumber perikanan lingkungan dan perikanan di kawasan berbasis risiko dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat</p>	<p>1. Meningkatkan pelayanan layanan lingkungan laut yang menyeluruh di area wilayah yang beresiko pada mangrove laut, pulau dan</p>	



Tabel 2.2  
Tujuan, Maksud, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

TUJUAN	DAKARAN	STRATEGI	KEAJARAN
<b>VIII. Meningkatkan Jombang Healt dan Kualitas untuk Semua</b>			
<b>VIII.1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas</b>			
<p>formulasi program yang terencana dan berkelanjutan.</p>	<p>komponen kualitas lingkungan hidup</p>	<p>1. Penguatan sistem pemerintahan kualitas lingkungan hidup melalui: a) Penguatan mekanisme pelaksanaan kebijakan lingkungan; b) Peningkatan pemerintahan kualitas lingkungan dan secara bersama-sama lingkungan hidup; c) Penguatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); d) penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e) Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan faktor lingkungan; dan f) Penguatan secara menyeluruh, sistem dan lingkungan hidup yang menjadi tema utama.</p> <p>2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui: a) pengendalian pencemaran udara bersih ke dalam air dan kerangka kerangka air; b) pengendalian air; c) pengendalian parameter udara dan suhu indoor; d) pengendalian upaya pemertanian untuk polusi rumah kaca; e) pemertanian kualitas udara outdoor; f) pengendalian upaya kesehatan iklim; g) peningkatan upaya kesehatan; h) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup; i) Kampanye dan</p>	<p>1. Mengembangkan pelayanan kualitas lingkungan hidup yang mengacu ke upaya utama yang berorientasi pada masyarakat kualitas lingkungan hidup, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang kuat, sistem dan menyeluruh, keberlanjutan, pengendalian sumber lingkungan, pengendalian kualitas lingkungan, dan berorientasi masyarakat, sebagai wujud pembangunan yang ramah lingkungan serta berorientasi pada lingkungan yang bersih dan sehat.</p> <p>2. Meningkatkan pengelolaan kesehatan lingkungan, khususnya pengelolaan kualitas lingkungan kesehatan, peningkatan partisipasi masyarakat dan kerja sama dalam pengelolaan, baik Peningkatan dan peningkatan KEM</p>

TUJUAN	DAKARAH	STRATEGI	AKSI SUBSIDIAR
	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan sampah</p>	<p>penelitian untuk uji dan kesuksesannya (j) melakukan dan meningkatkan kualitas kemampuan layanan dan pemeliharaan jasa lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Kerja Standar Prosedur dan Kerja lain dalam upaya pencapaian target layanan pemukiman sampah</li> <li>2. Peningkatan layanan dan pelayanan pelanggan sampah</li> <li>3. Peningkatan ketidaktuntunan layanan melalui komunikasi, informasi dan edukasi</li> <li>4. Peningkatan komitmen bagi semua pihak melalui penerapan konsep proses dalam dan melibatkan upaya pencapaian target</li> </ol>	<p>di pelottan &amp; inovasi strategi</p> <p>ditindaklanjuti implementasi kegiatan pelayanan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga lainnya yang meliputi pelayanan, upaya pencapaian target dan pemukiman sampah serta pelayanan pelanggan masyarakat dalam pelayanan sampah</p>
<p>Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Daerah</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun perencanaan, bidang lingkungan, serta pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja</li> <li>2. Meningkatkan kompetensi BCDI melalui pelatihan dan pendidikan</li> <li>3. Menerapkan standar dan prosedur pelaksanaan</li> </ol>	<p>Meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan aparatur dan pelaksanaan standar dan prosedur</p>

## BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN RINDANG TERUSAN

Melalui program dan kegiatan sesuai cara kerja dan mekanisme tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja dan kualitas layanan publik, berbagai program dilaksanakan sebagai dukungan kegiatan yang dilakukan dan upaya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam lingkungan hidup Kabupaten Jombang guna mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat dapat meningkatkan partisipasi-pemeliharaan yang dihadapi.

Program dan kegiatan dalam Lingkungan Hidup yang dilaksanakan untuk Periode Tahun 2024-2029 meliputi program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang dalam rangka mencapai strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jombang. Untuk pembangunan daerah diarahkan agar pembangunan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan dapat lebih baik dan terarah. Struktur pembangunan pada tahun mendatang adalah point-point utama yang sejalan dengan tema pembangunan pada tahun mendatang. Dengan demikian, hasil pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan akan terpacu nyata. Untuk arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang selama 5 (lima) tahun.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 hingga 2029 adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bupati Jombang. Sedangkan rencana program dan kegiatan tahun 2025 adalah sebagai bagian dari upaya mencapai kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pelaksanaan Rencana PD Tahun 2025. Adapun rencana strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dijabarkan pada tabel 6.1 termasuk rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, seperti yang dijabarkan dalam tabel 6.2 berikut ini:

## Memorandum of Understanding

MEMORANDUM FOR THE RECORD  
 SUBJECT: [Illegible]

TO :	FROM :	DATE :	SUBJECT :	REFERENCE :
[Illegible]				
[Illegible]				
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]

### Metode analisis pasar (SWOT)

No	Kategori	Kelebihan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)	Peluang (Opportunities)	
1	Kelebihan (Strengths)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi strategis</li> <li>2. Fasilitas lengkap</li> <li>3. Harga terjangkau</li> <li>4. Pelayanan ramah</li> <li>5. Kualitas produk tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya operasional tinggi</li> <li>2. Persaingan ketat</li> <li>3. Perubahan selera konsumen</li> <li>4. Ketergantungan pada pemasok</li> <li>5. Keterbatasan modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan pasar</li> <li>2. Inovasi teknologi</li> <li>3. Perubahan regulasi</li> <li>4. Kolaborasi dengan mitra</li> <li>5. Ekspansi ke pasar baru</li> </ul>	
2	Kelemahan (Weaknesses)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya operasional tinggi</li> <li>2. Persaingan ketat</li> <li>3. Perubahan selera konsumen</li> <li>4. Ketergantungan pada pemasok</li> <li>5. Keterbatasan modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi strategis</li> <li>2. Fasilitas lengkap</li> <li>3. Harga terjangkau</li> <li>4. Pelayanan ramah</li> <li>5. Kualitas produk tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan pasar</li> <li>2. Inovasi teknologi</li> <li>3. Perubahan regulasi</li> <li>4. Kolaborasi dengan mitra</li> <li>5. Ekspansi ke pasar baru</li> </ul>	
3	Peluang (Opportunities)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan pasar</li> <li>2. Inovasi teknologi</li> <li>3. Perubahan regulasi</li> <li>4. Kolaborasi dengan mitra</li> <li>5. Ekspansi ke pasar baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi strategis</li> <li>2. Fasilitas lengkap</li> <li>3. Harga terjangkau</li> <li>4. Pelayanan ramah</li> <li>5. Kualitas produk tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya operasional tinggi</li> <li>2. Persaingan ketat</li> <li>3. Perubahan selera konsumen</li> <li>4. Ketergantungan pada pemasok</li> <li>5. Keterbatasan modal</li> </ul>	
4	Ancaman (Threats)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya operasional tinggi</li> <li>2. Persaingan ketat</li> <li>3. Perubahan selera konsumen</li> <li>4. Ketergantungan pada pemasok</li> <li>5. Keterbatasan modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi strategis</li> <li>2. Fasilitas lengkap</li> <li>3. Harga terjangkau</li> <li>4. Pelayanan ramah</li> <li>5. Kualitas produk tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan pasar</li> <li>2. Inovasi teknologi</li> <li>3. Perubahan regulasi</li> <li>4. Kolaborasi dengan mitra</li> <li>5. Ekspansi ke pasar baru</li> </ul>	

### Metode analisis pasar alternatif

No	Nama	Alamat	Jumlah karyawan	Jumlah produksi	Kapasitas produksi
1	PT. BUKIT BARU	Jl. Raya Bukit Baru	100	10000	10000
2	PT. BUKIT BARU	Jl. Raya Bukit Baru	100	10000	10000
3	PT. BUKIT BARU	Jl. Raya Bukit Baru	100	10000	10000
4	PT. BUKIT BARU	Jl. Raya Bukit Baru	100	10000	10000
5	PT. BUKIT BARU	Jl. Raya Bukit Baru	100	10000	10000
6	PT. BUKIT BARU	Jl. Raya Bukit Baru	100	10000	10000
7	PT. BUKIT BARU	Jl. Raya Bukit Baru	100	10000	10000
8	PT. BUKIT BARU	Jl. Raya Bukit Baru	100	10000	10000
9	PT. BUKIT BARU	Jl. Raya Bukit Baru	100	10000	10000
10	PT. BUKIT BARU	Jl. Raya Bukit Baru	100	10000	10000

### Metode analisis hasil observasi

No	Kategori	Indikator	Tanda	Bentuk
1	Keterampilan	Kemampuan berinteraksi sosial	- Berinteraksi dengan teman sebangkunya - Berinteraksi dengan guru	- Berinteraksi dengan teman sebangkunya - Berinteraksi dengan guru
2	Keterampilan	Kemampuan berinteraksi sosial	- Berinteraksi dengan teman sebangkunya - Berinteraksi dengan guru	- Berinteraksi dengan teman sebangkunya - Berinteraksi dengan guru
3	Keterampilan	Kemampuan berinteraksi sosial	- Berinteraksi dengan teman sebangkunya - Berinteraksi dengan guru	- Berinteraksi dengan teman sebangkunya - Berinteraksi dengan guru
4	Keterampilan	Kemampuan berinteraksi sosial	- Berinteraksi dengan teman sebangkunya - Berinteraksi dengan guru	- Berinteraksi dengan teman sebangkunya - Berinteraksi dengan guru

### Metode analisis team (MATA)

No	Kategori	Kriteria	Indikator	Penilaian
1	Struktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya pemimpin</li> <li>Adanya anggota</li> <li>Adanya tugas</li> <li>Adanya tanggung jawab</li> <li>Adanya wewenang</li> <li>Adanya komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya pemimpin</li> <li>Adanya anggota</li> <li>Adanya tugas</li> <li>Adanya tanggung jawab</li> <li>Adanya wewenang</li> <li>Adanya komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya pemimpin</li> <li>Adanya anggota</li> <li>Adanya tugas</li> <li>Adanya tanggung jawab</li> <li>Adanya wewenang</li> <li>Adanya komunikasi</li> </ul>
2	Proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komunikasi</li> <li>Adanya kerjasama</li> <li>Adanya koordinasi</li> <li>Adanya kolaborasi</li> <li>Adanya konflik</li> <li>Adanya resolusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komunikasi</li> <li>Adanya kerjasama</li> <li>Adanya koordinasi</li> <li>Adanya kolaborasi</li> <li>Adanya konflik</li> <li>Adanya resolusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komunikasi</li> <li>Adanya kerjasama</li> <li>Adanya koordinasi</li> <li>Adanya kolaborasi</li> <li>Adanya konflik</li> <li>Adanya resolusi</li> </ul>
3	Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya hasil</li> <li>Adanya prestasi</li> <li>Adanya inovasi</li> <li>Adanya kreativitas</li> <li>Adanya produktivitas</li> <li>Adanya efisiensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya hasil</li> <li>Adanya prestasi</li> <li>Adanya inovasi</li> <li>Adanya kreativitas</li> <li>Adanya produktivitas</li> <li>Adanya efisiensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya hasil</li> <li>Adanya prestasi</li> <li>Adanya inovasi</li> <li>Adanya kreativitas</li> <li>Adanya produktivitas</li> <li>Adanya efisiensi</li> </ul>



## Metode analisis pasar alternatif

No	Nama	Alamat	Kategori Produk	Kategori Produk	Kategori Produk
			1. Produk yang akan dipromosikan 2. Produk yang akan dipromosikan 3. Produk yang akan dipromosikan 4. Produk yang akan dipromosikan	1. Produk yang akan dipromosikan 2. Produk yang akan dipromosikan 3. Produk yang akan dipromosikan 4. Produk yang akan dipromosikan	1. Produk yang akan dipromosikan 2. Produk yang akan dipromosikan 3. Produk yang akan dipromosikan 4. Produk yang akan dipromosikan
			1. Produk yang akan dipromosikan 2. Produk yang akan dipromosikan 3. Produk yang akan dipromosikan 4. Produk yang akan dipromosikan	1. Produk yang akan dipromosikan 2. Produk yang akan dipromosikan 3. Produk yang akan dipromosikan 4. Produk yang akan dipromosikan	1. Produk yang akan dipromosikan 2. Produk yang akan dipromosikan 3. Produk yang akan dipromosikan 4. Produk yang akan dipromosikan
			1. Produk yang akan dipromosikan 2. Produk yang akan dipromosikan 3. Produk yang akan dipromosikan 4. Produk yang akan dipromosikan	1. Produk yang akan dipromosikan 2. Produk yang akan dipromosikan 3. Produk yang akan dipromosikan 4. Produk yang akan dipromosikan	1. Produk yang akan dipromosikan 2. Produk yang akan dipromosikan 3. Produk yang akan dipromosikan 4. Produk yang akan dipromosikan

## Metode analisis pasar (MMP)

1. Identifikasi pasar	2. Analisis pasar	3. Analisis kompetitor	4. Analisis SWOT	5. Analisis peluang dan ancaman	6. Analisis strategi
-	-	-	-	-	-





## Metode analitice pentru chimia

Metoda	Principiu	Aplicații	Avantaje	Dezavantaje
Analiza gravimetrică	Se bazează pe măsurarea masei unei substanțe sau a produsului său de reacție.	Determinarea conținutului de apă, sulf, carbon, azot și fosfor în probe organice.	Alta precizie și acuratețe.	Procedeu lent și necesită echipament specializat.
Analiza volumetrică	Se bazează pe măsurarea volumului unei soluții de reactiv care reacționează cu o anumită cantitate de substanță.	Determinarea conținutului de acizi, baze, oxidanți și reductanți.	Alta precizie și acuratețe.	Procedeu lent și necesită echipament specializat.
Analiza colorimetrică	Se bazează pe măsurarea absorbției de lumină a unei soluții care conține o substanță colorată.	Determinarea conținutului de proteine, zahăruri, vitamine și minerale.	Alta sensibilitate și acuratețe.	Procedeu lent și necesită echipament specializat.
Analiza spectrometrică	Se bazează pe măsurarea absorbției de radiație electromagnetică de către o substanță.	Determinarea conținutului de metale, nemetale și compuși organici.	Alta sensibilitate și acuratețe.	Procedeu lent și necesită echipament specializat.
Analiza electrochimică	Se bazează pe măsurarea potențialului și curentului într-o celulă electrochimică.	Determinarea conținutului de metale, nemetale și compuși organici.	Alta sensibilitate și acuratețe.	Procedeu lent și necesită echipament specializat.
Analiza cromatografică	Se bazează pe separarea componentelor unei probe pe baza diferențelor de polaritate și afinități.	Determinarea conținutului de metale, nemetale și compuși organici.	Alta sensibilitate și acuratețe.	Procedeu lent și necesită echipament specializat.

### Memorandum of Understanding

No.	Date	Time	Place	Participants	Agenda

### Memorandum of Understanding

No.	Item	Remarks
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...
4.	...	...
5.	...	...
6.	...	...
7.	...	...
8.	...	...
9.	...	...
10.	...	...
11.	...	...
12.	...	...
13.	...	...
14.	...	...
15.	...	...
16.	...	...
17.	...	...
18.	...	...
19.	...	...
20.	...	...
21.	...	...
22.	...	...
23.	...	...
24.	...	...
25.	...	...
26.	...	...
27.	...	...
28.	...	...
29.	...	...
30.	...	...
31.	...	...
32.	...	...
33.	...	...
34.	...	...
35.	...	...
36.	...	...
37.	...	...
38.	...	...
39.	...	...
40.	...	...
41.	...	...
42.	...	...
43.	...	...
44.	...	...
45.	...	...
46.	...	...
47.	...	...
48.	...	...
49.	...	...
50.	...	...

## Memorandum of Understanding

Date	Time	Location	Participants	Agreements
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. A. B. C.</li> <li>Mr. D. E. F.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. G. H. I.</li> <li>Mr. J. K. L.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. M. N. O.</li> <li>Mr. P. Q. R.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. S. T. U.</li> <li>Mr. V. W. X.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. Y. Z. A.</li> <li>Mr. B. C. D.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. E. F. G.</li> <li>Mr. H. I. J.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. K. L. M.</li> <li>Mr. N. O. P.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. Q. R. S.</li> <li>Mr. T. U. V.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. W. X. Y.</li> <li>Mr. Z. A. B.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. C. D. E.</li> <li>Mr. F. G. H.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. I. J. K.</li> <li>Mr. L. M. N.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. O. P. Q.</li> <li>Mr. R. S. T.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. U. V. W.</li> <li>Mr. X. Y. Z.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. A. B. C.</li> <li>Mr. D. E. F.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. G. H. I.</li> <li>Mr. J. K. L.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. M. N. O.</li> <li>Mr. P. Q. R.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. S. T. U.</li> <li>Mr. V. W. X.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. Y. Z. A.</li> <li>Mr. B. C. D.</li> </ul>	

## Metode analisis pasar (Marketing)

No.	Kategori	Sub-kategori	Metode Analisis	Alat/Bahan	Kelebihan
1	Survei	Survei pasar	Survei pasar adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen. Metode ini dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung, telepon, atau melalui surat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara langsung</li> <li>• Wawancara telepon</li> <li>• Wawancara melalui surat</li> <li>• Wawancara melalui internet</li> <li>• Wawancara melalui media sosial</li> <li>• Wawancara melalui aplikasi</li> <li>• Wawancara melalui video</li> <li>• Wawancara melalui podcast</li> <li>• Wawancara melalui webinar</li> <li>• Wawancara melalui konferensi</li> <li>• Wawancara melalui forum</li> <li>• Wawancara melalui blog</li> <li>• Wawancara melalui newsletter</li> <li>• Wawancara melalui podcast</li> <li>• Wawancara melalui webinar</li> <li>• Wawancara melalui konferensi</li> <li>• Wawancara melalui forum</li> <li>• Wawancara melalui blog</li> <li>• Wawancara melalui newsletter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat memberikan informasi yang akurat dan mendalam.</li> <li>• Dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.</li> <li>• Dapat dilakukan secara individu atau kelompok.</li> <li>• Dapat dilakukan secara online atau offline.</li> <li>• Dapat dilakukan secara berkala atau sekali.</li> <li>• Dapat dilakukan secara terencana atau spontan.</li> <li>• Dapat dilakukan secara formal atau informal.</li> <li>• Dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.</li> <li>• Dapat dilakukan secara anonim atau non-anonim.</li> <li>• Dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.</li> <li>• Dapat dilakukan secara individu atau kelompok.</li> <li>• Dapat dilakukan secara online atau offline.</li> <li>• Dapat dilakukan secara berkala atau sekali.</li> <li>• Dapat dilakukan secara terencana atau spontan.</li> <li>• Dapat dilakukan secara formal atau informal.</li> <li>• Dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.</li> <li>• Dapat dilakukan secara anonim atau non-anonim.</li> </ul>
2	Observasi	Observasi langsung	Observasi langsung adalah metode yang digunakan untuk mengamati perilaku konsumen secara langsung. Metode ini dapat dilakukan dengan cara mengamati konsumen di tempat penjualan, di toko, atau di rumah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi langsung</li> <li>• Observasi tidak langsung</li> <li>• Observasi partisipatif</li> <li>• Observasi non-partisipatif</li> <li>• Observasi terencana</li> <li>• Observasi tidak terencana</li> <li>• Observasi terstruktur</li> <li>• Observasi tidak terstruktur</li> <li>• Observasi terencana dan terstruktur</li> <li>• Observasi tidak terencana dan tidak terstruktur</li> <li>• Observasi terencana dan tidak terstruktur</li> <li>• Observasi tidak terencana dan terstruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat memberikan informasi yang akurat dan mendalam.</li> <li>• Dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.</li> <li>• Dapat dilakukan secara individu atau kelompok.</li> <li>• Dapat dilakukan secara online atau offline.</li> <li>• Dapat dilakukan secara berkala atau sekali.</li> <li>• Dapat dilakukan secara terencana atau spontan.</li> <li>• Dapat dilakukan secara formal atau informal.</li> <li>• Dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.</li> <li>• Dapat dilakukan secara anonim atau non-anonim.</li> </ul>
3	Eksperimen	Eksperimen pasar	Eksperimen pasar adalah metode yang digunakan untuk menguji pengaruh suatu variabel terhadap perilaku konsumen. Metode ini dapat dilakukan dengan cara menguji pengaruh harga, promosi, atau kemasan terhadap perilaku konsumen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksperimen pasar</li> <li>• Eksperimen laboratorium</li> <li>• Eksperimen lapangan</li> <li>• Eksperimen terencana</li> <li>• Eksperimen tidak terencana</li> <li>• Eksperimen terstruktur</li> <li>• Eksperimen tidak terstruktur</li> <li>• Eksperimen terencana dan terstruktur</li> <li>• Eksperimen tidak terencana dan tidak terstruktur</li> <li>• Eksperimen terencana dan tidak terstruktur</li> <li>• Eksperimen tidak terencana dan terstruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat memberikan informasi yang akurat dan mendalam.</li> <li>• Dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.</li> <li>• Dapat dilakukan secara individu atau kelompok.</li> <li>• Dapat dilakukan secara online atau offline.</li> <li>• Dapat dilakukan secara berkala atau sekali.</li> <li>• Dapat dilakukan secara terencana atau spontan.</li> <li>• Dapat dilakukan secara formal atau informal.</li> <li>• Dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.</li> <li>• Dapat dilakukan secara anonim atau non-anonim.</li> </ul>

## Memorandum of Understanding

No.	Date	Parties	Subject
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			
70.			
71.			
72.			
73.			
74.			
75.			
76.			
77.			
78.			
79.			
80.			
81.			
82.			
83.			
84.			
85.			
86.			
87.			
88.			
89.			
90.			
91.			
92.			
93.			
94.			
95.			
96.			
97.			
98.			
99.			
100.			

1. **Identify the main components of the system.**  
 2. **Describe the flow of data and information.**  
 3. **Explain the role of each component.**

### Business Process Management (BPM)

BPM is a systematic approach to identifying, analyzing, and improving business processes. It involves the use of technology and data to optimize workflow and efficiency.



### Lernzettel: Grundlagen der Informatik

Kategorie	Beschreibung	Definition	Beispiel	Anwendung	Vorteile	Nachteile	Verbreitung	Zukunft	Fazit	Literatur	Zusammenfassung	Notizen
Algorithmen	Prozedural	Schritt-für-Schritt-Anleitung	Rezept für Kuchen	Programmierung	Klarheit	Langweilig	Allgemein	Stabil	Präzise	[1]	Schritt-für-Schritt	Anleitung
Datenbanken	Strukturiert	Organisierte Datensammlung	Kundenliste	Datenmanagement	Effizienz	Flexibilität	Widely used	Evolving	Accurate	[2]	Organized data	List
Netzwerke	Vernetzt	Kommunikationssystem	Internet	Datenübertragung	Globalität	Sicherheit	Ubiquitous	Growing	Reliable	[3]	Connected system	Network
Sicherheit	Verschlüsselt	Datenschutz	Bankkonto	Informationsvermittlung	Integrität	Anonymität	Essential	Critical	Secure	[4]	Encrypted data	Security
Software	Anwendung	Programm	Office Suite	Produktion	Produktivität	Wartung	Common	Stable	Efficient	[5]	Application software	Software
Hardware	Geräte	Physische Komponenten	Computer	Anwendung	Leistung	Kosten	Widely used	Evolving	Reliable	[6]	Physical components	Hardware
Systeme	Integriert	Gesamtlösung	Betriebssystem	Anwendung	Effizienz	Flexibilität	Essential	Critical	Secure	[7]	Integrated system	System

Memorandum of Understanding

Item	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1	kg	100	1000	100000	
2	kg	100	1000	100000	
3	kg	100	1000	100000	
4	kg	100	1000	100000	
5	kg	100	1000	100000	
6	kg	100	1000	100000	
7	kg	100	1000	100000	
8	kg	100	1000	100000	
9	kg	100	1000	100000	
10	kg	100	1000	100000	
11	kg	100	1000	100000	
12	kg	100	1000	100000	
13	kg	100	1000	100000	
14	kg	100	1000	100000	
15	kg	100	1000	100000	
16	kg	100	1000	100000	
17	kg	100	1000	100000	
18	kg	100	1000	100000	
19	kg	100	1000	100000	
20	kg	100	1000	100000	
21	kg	100	1000	100000	
22	kg	100	1000	100000	
23	kg	100	1000	100000	
24	kg	100	1000	100000	
25	kg	100	1000	100000	
26	kg	100	1000	100000	
27	kg	100	1000	100000	
28	kg	100	1000	100000	
29	kg	100	1000	100000	
30	kg	100	1000	100000	
31	kg	100	1000	100000	
32	kg	100	1000	100000	
33	kg	100	1000	100000	
34	kg	100	1000	100000	
35	kg	100	1000	100000	
36	kg	100	1000	100000	
37	kg	100	1000	100000	
38	kg	100	1000	100000	
39	kg	100	1000	100000	
40	kg	100	1000	100000	
41	kg	100	1000	100000	
42	kg	100	1000	100000	
43	kg	100	1000	100000	
44	kg	100	1000	100000	
45	kg	100	1000	100000	
46	kg	100	1000	100000	
47	kg	100	1000	100000	
48	kg	100	1000	100000	
49	kg	100	1000	100000	
50	kg	100	1000	100000	

### Memorandum of Understanding

No.	Item	Unit	Quantity	Value	Remarks
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

Memorandum of Understanding

Item	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1	kg	100	1000	100000	
2	kg	100	1000	100000	
3	kg	100	1000	100000	
4	kg	100	1000	100000	
5	kg	100	1000	100000	
6	kg	100	1000	100000	
7	kg	100	1000	100000	
8	kg	100	1000	100000	
9	kg	100	1000	100000	
10	kg	100	1000	100000	
11	kg	100	1000	100000	
12	kg	100	1000	100000	
13	kg	100	1000	100000	
14	kg	100	1000	100000	
15	kg	100	1000	100000	
16	kg	100	1000	100000	
17	kg	100	1000	100000	
18	kg	100	1000	100000	
19	kg	100	1000	100000	
20	kg	100	1000	100000	
21	kg	100	1000	100000	
22	kg	100	1000	100000	
23	kg	100	1000	100000	
24	kg	100	1000	100000	
25	kg	100	1000	100000	
26	kg	100	1000	100000	
27	kg	100	1000	100000	
28	kg	100	1000	100000	
29	kg	100	1000	100000	
30	kg	100	1000	100000	
31	kg	100	1000	100000	
32	kg	100	1000	100000	
33	kg	100	1000	100000	
34	kg	100	1000	100000	
35	kg	100	1000	100000	
36	kg	100	1000	100000	
37	kg	100	1000	100000	
38	kg	100	1000	100000	
39	kg	100	1000	100000	
40	kg	100	1000	100000	
41	kg	100	1000	100000	
42	kg	100	1000	100000	
43	kg	100	1000	100000	
44	kg	100	1000	100000	
45	kg	100	1000	100000	
46	kg	100	1000	100000	
47	kg	100	1000	100000	
48	kg	100	1000	100000	
49	kg	100	1000	100000	
50	kg	100	1000	100000	

Memorandum of Understanding

Item	Quantity	Unit	Price	Total	Remarks
1. Rice	1000	kg	1.50	1500.00	
2. Oil	500	kg	2.00	1000.00	
3. Beans	200	kg	1.00	200.00	
4. Sugar	100	kg	1.50	150.00	
5. Eggs	1000	pieces	0.50	500.00	
6. Chicken	50	pieces	10.00	500.00	
7. Pork	100	kg	5.00	500.00	
8. Beef	100	kg	5.00	500.00	
9. Fish	100	kg	5.00	500.00	
10. Fruit	100	kg	5.00	500.00	
11. Vegetables	100	kg	5.00	500.00	
12. Milk	100	kg	5.00	500.00	
13. Yogurt	100	kg	5.00	500.00	
14. Cheese	100	kg	5.00	500.00	
15. Butter	100	kg	5.00	500.00	
16. Flour	100	kg	5.00	500.00	
17. Baking Powder	100	kg	5.00	500.00	
18. Salt	100	kg	5.00	500.00	
19. Pepper	100	kg	5.00	500.00	
20. Spices	100	kg	5.00	500.00	
21. Herbs	100	kg	5.00	500.00	
22. Mushrooms	100	kg	5.00	500.00	
23. Onions	100	kg	5.00	500.00	
24. Garlic	100	kg	5.00	500.00	
25. Potatoes	100	kg	5.00	500.00	
26. Carrots	100	kg	5.00	500.00	
27. Celery	100	kg	5.00	500.00	
28. Broccoli	100	kg	5.00	500.00	
29. Cauliflower	100	kg	5.00	500.00	
30. Spinach	100	kg	5.00	500.00	
31. Kale	100	kg	5.00	500.00	
32. Swiss Chard	100	kg	5.00	500.00	
33. Bok Choy	100	kg	5.00	500.00	
34. Napa Cabbage	100	kg	5.00	500.00	
35. Green Cabbage	100	kg	5.00	500.00	
36. Lettuce	100	kg	5.00	500.00	
37. Tomatoes	100	kg	5.00	500.00	
38. Cucumbers	100	kg	5.00	500.00	
39. Zucchini	100	kg	5.00	500.00	
40. Eggplant	100	kg	5.00	500.00	
41. Bell Peppers	100	kg	5.00	500.00	
42. Hot Peppers	100	kg	5.00	500.00	
43. Peas	100	kg	5.00	500.00	
44. Corn	100	kg	5.00	500.00	
45. Potatoes	100	kg	5.00	500.00	
46. Sweet Potatoes	100	kg	5.00	500.00	
47. Yams	100	kg	5.00	500.00	
48. Cassava	100	kg	5.00	500.00	
49. Taro	100	kg	5.00	500.00	
50. Amaranth	100	kg	5.00	500.00	
51. Millet	100	kg	5.00	500.00	
52. Sorghum	100	kg	5.00	500.00	
53. Rice	100	kg	5.00	500.00	
54. Beans	100	kg	5.00	500.00	
55. Lentils	100	kg	5.00	500.00	
56. Chickpeas	100	kg	5.00	500.00	
57. Peas	100	kg	5.00	500.00	
58. Soybeans	100	kg	5.00	500.00	
59. Mung Beans	100	kg	5.00	500.00	
60. Pigeon Peas	100	kg	5.00	500.00	
61. Black Beans	100	kg	5.00	500.00	
62. Kidney Beans	100	kg	5.00	500.00	
63. Navy Beans	100	kg	5.00	500.00	
64. Great Northern Beans	100	kg	5.00	500.00	
65. Lima Beans	100	kg	5.00	500.00	
66. Pinto Beans	100	kg	5.00	500.00	
67. Black-eyed Peas	100	kg	5.00	500.00	
68. Adzuki Beans	100	kg	5.00	500.00	
69. Mung Beans	100	kg	5.00	500.00	
70. Soybeans	100	kg	5.00	500.00	
71. Chickpeas	100	kg	5.00	500.00	
72. Lentils	100	kg	5.00	500.00	
73. Peas	100	kg	5.00	500.00	
74. Beans	100	kg	5.00	500.00	
75. Rice	100	kg	5.00	500.00	
76. Corn	100	kg	5.00	500.00	
77. Potatoes	100	kg	5.00	500.00	
78. Sweet Potatoes	100	kg	5.00	500.00	
79. Yams	100	kg	5.00	500.00	
80. Cassava	100	kg	5.00	500.00	
81. Taro	100	kg	5.00	500.00	
82. Amaranth	100	kg	5.00	500.00	
83. Millet	100	kg	5.00	500.00	
84. Sorghum	100	kg	5.00	500.00	
85. Rice	100	kg	5.00	500.00	
86. Beans	100	kg	5.00	500.00	
87. Lentils	100	kg	5.00	500.00	
88. Chickpeas	100	kg	5.00	500.00	
89. Peas	100	kg	5.00	500.00	
90. Soybeans	100	kg	5.00	500.00	
91. Mung Beans	100	kg	5.00	500.00	
92. Pigeon Peas	100	kg	5.00	500.00	
93. Black Beans	100	kg	5.00	500.00	
94. Kidney Beans	100	kg	5.00	500.00	
95. Navy Beans	100	kg	5.00	500.00	
96. Great Northern Beans	100	kg	5.00	500.00	
97. Lima Beans	100	kg	5.00	500.00	
98. Pinto Beans	100	kg	5.00	500.00	
99. Black-eyed Peas	100	kg	5.00	500.00	
100. Adzuki Beans	100	kg	5.00	500.00	

### Memorandum of Understanding

No	Item	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks	Signature	Date
1	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...

### Memorandum of Understanding

No.	Name	Address	Phone	Signature	Date	Signature	Date	Signature	Date	Signature	Date	Signature	Date	Signature	Date	Signature	Date	Signature	Date
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

Memorandum of Understanding

No.	Item	Unit	Quantity	Value	Total
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

### Memorandum kepada Tuan-tuan Ahli-ahli

No.	Nama	Jawatan	Alamat	Telefon	Teleks	Faksimili	Emel	Perkhidmatan	Keahlian	Nota
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Memorandum of Understanding

No.	Item	Unit	Quantity	Value	Total	Remarks
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...

Memorandum of Understanding

No.	Item	Unit	Quantity	Value	Total
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

### Formulário de análise de risco (FAR)

Item	Descrição	Causa	Efeito	Gravidade	Frequência	Risco	Medidas	Responsável	Data	Análise	
										Risco	Medidas
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Memorandum of Understanding

Item	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1	kg	100	1000	100000	
2	kg	200	2000	400000	
3	kg	300	3000	900000	
4	kg	400	4000	1600000	
5	kg	500	5000	2500000	
6	kg	600	6000	3600000	
7	kg	700	7000	4900000	
8	kg	800	8000	6400000	
9	kg	900	9000	8100000	
10	kg	1000	10000	10000000	
Total					

Memorandum of Understanding

No.	Item	Unit	Quantity	Value	Remarks
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...



Urutan Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.3

Program Prioritas Bupati Jombang yang dilaksanakan oleh IKM

No	Program Pilotase	Subsistem	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kes
1	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Terintegrasi dengan Ruang Publik Terbuka dan Terbuka lainnya	Terbangunnya Ruang Terbuka Hijau dengan fungsi publik sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menarik minat masyarakat	Program Pengelolaan Kawasan Perkotaan	Pengelolaan Kawasan Perkotaan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	

Untuk mendukung misi Bupati Jombang 20-3 untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang smart dan berkeadilan dengan target Terbentuknya lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkeadilan, maka lingkungan hidup Kabupaten Jombang mendukung Strategi KEMAS 2025-2029 meningkatkan Pengelolaan Kawasan Perkotaan Bupati, Bupati Jombang akan membangun ANTA CITY DAN CLM Kabupaten Jombang yang mendukung terwujud AGUA CITY JOHOREN KEMAS (Ambungan Air dan Kota untuk Semua) dengan Program unggulan Terbentuknya Ruang Terbuka Hijau dengan fungsi publik sebagai tempat meningkatkan kualitas lingkungan dan menarik minat masyarakat dengan Pagu Indentif sebesar Rp. 50.000.000.000,- dengan target terbangunnya 2 unit RTH selama 2 tahun hingga akhir tahun 2025.

Seperti yang telah diuraikan dalam BAB III, demi terwujudnya Tujuan dan Strategi RPJMD yang harus dilaksanakan oleh seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Jombang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menjadi salah satu organisasi perangkat daerah yang membantu dalam pencapaian tujuan ke-6, yaitu "Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan". Sedangkan indikatornya adalah "Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan". Strategi RPJMD tersebut memiliki 2 (dua) indikator sasaran yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
2. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Salah satu caranya, Tabel 7.1 di bawah ini menunjukkan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja perangkat daerah sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan strategi RPJMD.

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KID	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
11)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	Indeks	59,25	59,31	59,37	59,24	59,31	59,38		
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	72,63	72,71	72,79	72,87	72,94	73,02		
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	80,00	80,00	80,10	80,18	80,20	80,28		

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KURT
			2025	2026	2027	2028	2029	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	71,83	73,77	75,70	77,63	79,56	81,49	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
3	Kelembagaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di lingkungan, baik PPLH dan POU LP (MS) lingkungan pada Kecamatan dan Desa	Forum	80	80	80	80	80	80	
4	IKLH (R2025) Kabupaten	Indeks	73,25	73,25	73,77	74,29	74,81	75,33	
5	IKLH (R2026) Kabupaten	Indeks	74,38	74,48	74,58	74,68	74,78	74,88	
6	IKLH (R2027) Kabupaten	Indeks	80,44	80,44	80,44	80,44	80,44	80,44	
7	Terwujudnya tempat sampah di lingkungan pemukiman sampah	Forum	3,00	3,04	3,08	3,12	3,16	3,20	
8	Demikianlah nilai GDP (nominal)	Ten Rp D1	207.800,00	217.704,66	227.609,32	237.514,00	247.418,66	257.323,32	
9	Terwujudnya tempat sampah lingkungan pemukiman sampah	Ts	20,20	20,20	20,76	20,96	21,52	21,52	

## BAB V PENTUT

Rencana Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan utama tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan terdapat indikator dan dilaksanakan melalui proses perencanaan secara partisipatif dan transparan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait serta Stakeholder dan masyarakat bersama dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Rakja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.

Rencana Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 merupakan dasar strategis dan pedoman pelaksanaan saat bekerja termasuk dan 5 (lima) tahunan, serta berfungsi sebagai pedoman, panduan arah, rencana dan tujuan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pemerintahan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dokumen ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tiap tahun.

Jember, 19 September 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Jember



MIRYANULILAH, S.T., M.M.  
Pencapaian Tingkat 1  
NIP. 09700117 200112 1 000